

LAPORAN KINERJA

2018



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Jenderal Hortikultura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2019

Inspektur 1,



Ir. Susanto, MM
NIP. 19620507 199203 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sub sektor hortikultura sampai dengan saat ini masih memiliki peran yang strategis di dalam pembangunan sektor pertanian seiring dengan semakin tingginya kesadaran konsumen akan pentingnya konsumsi komoditas hortikultura. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Sub sektor hortikultura sampai Tahun 2018 tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sub sektor hortikultura terlihat dalam kontribusinya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestik Bruto sebesar Rp218.712,4 miliar, penyerapan tenaga kerja sejumlah 3.318.583 orang, serta meningkatkan kesejahteraan petani seiring meningkatnya nilai tukar petani (NTP) rata - rata Tahun 2018 yaitu 101,08.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura, terdapat lima sasaran strategis yaitu : sasaran pertama : 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura dengan indikator kinerja a) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 2,83%, b) Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 7,38%; 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura dengan indikator kinerja a) produksi cabai sebesar 2.245.440 ton dan b) produksi bawang merah sebesar 1.608.766 ton; 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) sebesar 100%; 4) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura dengan indikator kinerja Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura sebesar 5%; 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dengan indikator kinerja a) Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 82,50% b) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017 dengan target NK sebesar 73,75.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2018 melaksanakan satu program, yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Program tersebut diimplementasikan dalam 6 (enam) kegiatan utama antara lain; 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura, 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Kegiatan - kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.242.629.794.000,-.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari delapan indikator kinerja utama, tujuh indikator termasuk dalam capaian kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura yaitu sebesar 41,14% dari target 2,83% (capaian realisasi sebesar 1.454%); b) penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 7,62% dari target 7,38% (capaian realisasi sebesar 103,25%); c) produksi cabai sebesar 2.523.928 ton dari target 2.245.440 ton (capaian realisasi sebesar 112,40 %); d) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) sebesar 100% dari target 90% (capaian realisasi sebesar 111,11%); e) rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura sebesar 3,67% dari target luasan 5% (capaian realisasi sebesar 136,24%); f) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yaitu 79,44 dari target Nilai Kinerja 73,75 (capaian realisasi sebesar 107,72%); dan g) nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (capaian realisasi sebesar 101,78%. Satu indikator kinerja dengan capaian kategori berhasil yaitu produksi bawang merah sebesar 1.498.659 ton dari target 1.608.766 ton (capaian realisasi sebesar 93,15%) produksi bawang merah sebesar 1.498.659 ton dari target 1.608.766 ton (capaian realisasi sebesar 93,15%).

Peningkatan volume ekspor tahun 2018 terjadi pada beberapa komoditas unggulan seperti manggis (323,60%), pisang (67,10%), jamur (32,32%), salak (27,64%), nanas (8,80%), dan mangga (1,90%). Rata-rata pertumbuhan volume ekspor hortikultura sejak tahun 2016 - 2018 sebesar 17,67%. Upaya yang terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekspor produk hortikultura antara lain meningkatkan upaya perluasan pasar komoditas hortikultura potensial ekspor, membuat prioritas alokasi pengembangan kawasan untuk tujuan ekspor dengan pendampingan intensif dan prioritas berikutnya kawasan reguler untuk memenuhi pasar domestik, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas setempat untuk mempercepat registrasi kebun, meningkatkan upaya pembinaan dan pendampingan pengajuan pendaftaran rumah kemasan, membangun kelembagaan hortikultura yang mandiri dalam bentuk koorporasi untuk dapat

bermitra dengan perusahaan, dann melaksanakan bimbingan teknis pengendalian OPT secara kontinu.

Penurunan volume impor pada komoditas yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (jeruk dan bawang putih) adalah sebesar 20,27 % untuk jeruk dan 5,04% untuk bawang putih. Rata - rata penurunan impor untuk 2 (dua) komoditas tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 7,62 %. Upaya yang terus dilakukan untuk mendukung pencapaian target substitusi impor tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kawasan jeruk dan kawasan bawang putih yang disertai dengan pembinaan, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan, dan Meningkatkan ketersediaan benih bermutu untuk komoditas jeruk dan bawang putih.

Pencapaian produksi komoditas hortikultura strategis cabai masuk kategori sangat berhasil karena mencapai target produksi yaitu sebesar 2.523.928 ton dengan rincian cabai rawit sebesar 1.331.559 ton dan cabai besar sebesar 1.192.369 ton. Sedangkan pada komoditas bawang merah, produksinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1.498.659 ton dari target produksi sebesar 1.608.766 ton. Upaya yang perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja produksi cabai dan bawang antara lain melanjutkan pengembangan kawasan cabai dan bawang merah melalui dana APBN, pengaturan pola tanam, pengendalian OPT ramah lingkungan, penggunaan sarana produksi yang tepat, penyediaan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan (jika harga rendah), gudang berpendingin dan pemberdayaan champion cabai dan bawang merah.

Pencapaian sasaran program rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) termasuk kategori sangat berhasil karena capaiannya sebesar 111,11 % dari target sebesar 90 %. Alat mesin pasca panen yang disediakan antara lain motor roda-3, keranjang, timbangan, terpal, gerobak sorong, palet, blower/kipas angin dan troli atau peralatan lain sesuai kebutuhan kelompok penerima dan merupakan komponen pilihan. Alsintan pascapanen di atas sudah diadakan (dilakukan pengadaan), diedarkan dan digunakan untuk keperluan pascapanen sebanyak 60 unit.

Pencapaian sasaran program rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura termasuk kategori sangat berhasil karena capaian rasio sebesar 3,67% dari target maksimal 5%. Keberhasilan pengamanan produksi hortikultura ini antara lain disebabkan oleh peningkatan pengelolaan OPT hortikultura, koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku perlindungan, serta peningkatan sosialisasi/penyebarluasan informasi terkait pengelolaan OPT hortikultura.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 adalah 83,97 (memuaskan). Pencapaian nilai ini termasuk kategori sangat berhasil. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi perencanaan, pengukuran,

pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Capaian Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 mencapai 79,44 atau mencapai 107,72 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 73,75 atau dikategorikan sangat berhasil. Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala, melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker - satker mandiri, perlu dilakukan identifikasi potensi masalah yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan satker dalam pelaksanaan kegiatan dan petugas data melakukan validasi ke daerah yang absensi pelaporan datanya rendah.

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 22 Januari 2019 adalah sebesar Rp1.126.010.972.000,- atau 90,62 %. Rincian realisasi per kegiatan adalah : 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 91,62%; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura sebesar 83,90%; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura sebesar 97,13%, 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 93,39%, 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 75,78%, dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 92,69%. Nilai efisiensi sumberdaya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 adalah 75,9 %.

Adapun, penyebab tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain adalah: 1) Adanya refocusing anggaran pada bulan Juli 2018, dimana muncul kegiatan Bekerja sehingga memerlukan persiapan administrasi seperti penyusunan petunjuk teknis, verifikasi penerima bantuan dan administrasi pengadaan di daerah; 2) Beberapa komoditas memiliki jadwal tanam dan ketersediaan benih diakhir tahun; 3) Beberapa wilayah yang terkena bencana seperti Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat baru bisa melaksanakan kegiatan di akhir tahun; 4) Adanya gagal lelang dalam kegiatan pengembangan Kawasan seperti pada Satker Tugas Pembantuan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang mengalami gagal lelang pada kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai 50 ha; 5) Tidak terealisasinya pengadaan benih buah lainnya pada Kabupaten Kebumen berupa benih durian 5.000 batang dan lengkeng 6.000 batang, Kabupaten Jeneponto benih durian 2.000 batang, 6) Ketidaktersediaan benih dan tingginya harga benih bawang putih menghambat kegiatan pengembangan kawasan bawang putih; 7) Kegagalan perbanyak benih bawang merah di beberapa provinsi diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah; 8) Tidak tercapainya output kegiatan pengadaan benih bawang putih di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Solok; 9) Tidak tercapainya output pengembangan kawasan buah pada kegiatan #Bekerja di beberapa kabupaten

seperti kawasan mangga di Kab. Cirebon dan Indramayu dan kawasan manggis di Kab. Garut karena ketidaktersediaan lahan pada calon penerima bantuan RTMP, kawasan pisang di Kab. Bone, Brebes dan Banyumas, kawasan salak di Kab. Magelang, kawasan duku di Kab. Ogan Kemiring Ilir karena ketidaktersediaan benih bersertifikat; 10) Tidak tercapainya output kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura di Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan DIY.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2018 antara lain sebagai berikut: 1) Penugasan eselon II, III, dan IV untuk monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura yang didanai APBN; 2) Melakukan workshop percepatan Kegiatan TA 2018 di 9 provinsi yang memiliki anggaran terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan dan Bali; 3) Mengirim surat kepada seluruh satker agar segera melakukan percepatan anggaran dan memberikan arahan kepada KPA melakukan upaya percepatan realisasi dan memberikan peringatan kepada satker yang belum ada perubahan signifikan akan dipertimbangkan untuk dilakukan realokasi anggaran ke satker lain; 4) Menghimbau seluruh pelaksana kegiatan agar melakukan pendekatan dengan pihak ULP di masing-masing daerah dalam rangka mempercepat proses pengadaan; 5) Mengirim surat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera menerbitkan SK Pejabat Pengelola Satker pada saat terjadi mutasi jabatan;

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara optima; 2) Efisiensi dan harmonisasi cara kerja kesatkeran dan membuat skala prioritas kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan dukungan penganggaran yang memadai, 3) Melakukan perbaikan pengelolaan manajemen kesatkeran utamanya pola koordinasi dan optimalisasi SDM pengelola kegiatan, 4) Mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target-target serapan triwulan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan; 5) Mempercepat proses identifikasi CP/CL 2019 yaitu dilakukan sebelumnya pada akhir tahun 2018, sehingga jadwal tanam dapat dilaksanakan di musim hujan pada bulan Januari - Maret; 6) Segera melakukan persiapan lelang di akhir tahun 2018, sehingga pada awal tahun 2019 sudah dapat ditetapkan pemenang lelang dan barang dapat didistribusikan kepada kelompok tani yang akan melakukan tanam di bulan Januari - Maret 2019; 7) Pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugas tidak terhambat.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan akan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain akan lebih menggerakkan seluruh pihak di dalam sub sektor hortikultura sendiri, Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih

mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Capaian target pembangunan hortikultura Tahun 2018 terkait dengan program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambang Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2018 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Suwandi, MSI

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	8
1.5 Dukungan Anggaran	9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	21
2.3 Perjanjian Kinerja	22
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	26
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018	26
BAB IV. PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018	13
Tabel 2.	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018	21
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018	22
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018	23
Tabel 5.	Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018	29
Tabel 6.	Volume Ekspor Komoditas Hortikultura (ton) dan Pertumbuhan Ekspor (%)	31
Tabel 7.	Volume Impor Komoditas Hortikultura (ton) dan Penurunan Impor (%)	35
Tabel 8.	Fasilitasi Alsintan Pascapanen Hortikultura	47
Tabel 9.	Perkembangan Luas Serangan OPT Dibandingkan Luas Tanam Hortikultura Tahun 2017-2018	49
Tabel 10.	Data Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 2017 dan 2018 (Ha)	50
Tabel 11.	Penyesuaian Lokasi DPO Bidang Hortikultura 2018	55
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Kewenangan Instansi	63
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Berdasarkan Jenis Belanja TA 2018	63
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Kegiatan Utama	64
Tabel 15.	Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 per Triwulanan	65

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Volume Ekspor Komoditas Hortikultura Tahun 2016 - 2018	32
Gambar 2.	<i>Launching</i> Ekspor manggis dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober 2018.	33
Gambar 3.	Volume Impor Komoditas Jeruk dan Bawang Putih Tahun 2016 - 2018	36
Gambar 4.	Produksi Jeruk (Ton) Tahun 2016 - 2018	37
Gambar 5.	Pengembangan Kawasan Jeruk Tahun 2018	37
Gambar 6.	Produksi Bawang Putih (Ton) Tahun 2016 - 2018	38
Gambar 7.	Pengembangan Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Bandung, Solok, Cianjur dan Magelang	39
Gambar 8.	Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 - 2018	40
Gambar 9.	Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 - 2018	43
Gambar 10.	Bantuan Alat Pascapanen	48
Gambar 11.	LPHP Narmada, Nusa Tenggara Barat yang telah disertifikasi ISO 9001 : 2015	52
Gambar 12.	LPHP Bandar Buat, Sumatera Barat yang telah disertifikasi ISO 9001 : 2015	52
Gambar 13.	Gerakan Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Tahun 2018	54
Gambar 14.	Desa Pertanian Organik Bidang Hortikultura Tahun 2018	56
Gambar 15.	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 - 2017	59
Gambar 16.	Capaian Nilai Kinerja Tahun 2018	61
Gambar 17.	Penyerahan Penghargaan WBK Tahun 2018	62
Gambar 18.	Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menurut Kegiatan Utama Tahun 2018	64
Gambar 19.	Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 per-triwulan	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura
- Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 3. Sasaran Kerja Pegawai Eselon I dan II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018
- Lampiran 4. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2019
- Lampiran 5. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura 2018
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Revisi I)
- Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2018n (Revisi II)
- Lampiran 9. Realisasi Anggaran dan Fisik Per Triwulan Tahun 2018
- Lampiran 10. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas hortikultura merupakan kelompok komoditas pertanian yang sangat beragam dari 323 jenis tanaman sayuran buah dan florikultura yang tersebar di berbagai sentra untuk berbagai tujuan konsumsi maupun penggunaan lain. Komoditas ini akan semakin berkembang seiring dengan dinamika dan kebutuhan pasar.

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, sub sektor hortikultura sampai Tahun 2018 tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sub sektor hortikultura terlihat dalam kontribusinya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestik Bruto sebesar Rp218.712,4 miliar, penyerap tenaga kerja sejumlah 3.318.583 orang, serta meningkatkan kesejahteraan petani seiring meningkatnya nilai tukar petani (NTP) rata – rata Tahun 2018 yaitu 101,08.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura telah memberikan payung hukum pada penyelenggaran pembangunan hortikultura secara lebih komprehensif dan intensif. Dengan adanya peraturan legislasi ini diharapkan tujuan dari penyelenggaran pembangunan hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran produksi, produktivitas, mutu maupun kesinambungannya.

Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan hortikultura di Indonesia melalui Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura. Pelaksanaan Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan agroindustri yang menjadi bagian dari agenda NAWACITA, sejumlah komoditas hortikultura akan menjadi isu strategis komoditas pertanian yang mendapat perhatian serius dari

pemerintah dan pelaku usaha akibat kontribusinya terhadap perekonomian nasional antara lain : bawang merah, aneka cabai, jeruk, mangga, manggis, nenas, salak dan kentang.

Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura di Indonesia diantaranya rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk, lokasi usaha yang terpencar, skala usaha yang sempit dan belum efisien, serta kebijakan dan regulasi dibidang perbankan, transportasi dan logistik, ekspor dan impor yang belum sepenuhnya mendukung pelaku agribisnis hortikultura nasional. Hal ini menyebabkan produk hortikultura nasional kurang mampu bersaing dengan produk hortikultura yang berasal dari negara lain.

Secara umum beberapa kendala yang masih ditemui sebagai faktor penghambat pembangunan hortikultura diantaranya : (1) meningkatnya resiko kegagalan/kerusakan panen akibat perubahan lingkungan dan iklim global, (2) terbatasnya sumber daya dan daya dukung lahan dan infrastruktur usaha, (3) belum optimalnya kelembagaan perbenihan dan perlindungan tanaman, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan.

Dengan demikian, dalam rangka melanjutkan program dan kebijakan yang sudah ada serta meningkatkan kinerja pembangunan hortikultura maka Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan penekanan yang signifikan pada peningkatan produksi melalui budidaya hortikultura dan peningkatan daya saing sebagai upaya mempersiapkan produk hortikultura Indonesia yang bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 43/2015, pasal 381 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VII, Pasal 382 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Menteri,

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, sejak tahun 2016 susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan melalui unit - unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diatur pada Permentan Nomor 43/2015 Pasal 383, susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura,
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci struktur organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura dan sasaran kerja pegawai Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1 dan 2.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura Tahun 2018 adalah sebanyak 353 orang, dengan golongan I sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 50 orang, golongan III sebanyak 250 orang dan golongan IV sebanyak 50 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 184 orang dan perempuan sebanyak 169 orang. Sedangkan, rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 6 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 77 orang, Sarjana (S1) sebanyak 170 orang, Diploma (D3) sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 78 orang, SLTP sebanyak 7 orang dan SD sebanyak 7 orang. Rincian komposisi pegawai

Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar secara merata pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 119 orang, Direktorat Perbenihan sebanyak 46 orang, Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 41 orang, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 54 orang, Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 45 orang dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 48 orang.

1.5. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2018, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar Rp1.355.960.980.000,-. Seiring perkembangan waktu, terjadi pengurangan anggaran pada bulan Juli 2018 sebesar Rp100.000.000.000,- sehingga alokasi anggaran menjadi Rp1.255.960.980.000,-. Pada bulan Desember 2018 anggaran berkurang kembali sehingga menjadi Rp1.242.629.794.000,-.

Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada 103 satker.

Dari alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp1.242.629.794.000,- digunakan untuk mendukung enam (6) kegiatan utama yaitu kegiatan; 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp877.124.169.000,-, 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp106.186.109.000,-, 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp59.787.732.000,-, 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp49.244.685.000,-, 5) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp126.583.605.000,- serta 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp23.703.494.000,-.

Sedangkan untuk kegiatan di Pusat dari pagu senilai Rp113.956.703.000,- dialokasikan pada masing-masing unit Eselon II sebagai berikut; Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp9.850.307.000,- , Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp14.793.001.000,- , Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp5.407.185.000,-, Sekretariat Direktorat Jenderal senilai Rp79.144.605.000,-, Direktorat Buah dan Florikultura senilai Rp2.352.436.000,- dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp2.409.169.000,-.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen - komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi; a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura :

2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJPN yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan RPJMN 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025, memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan.

Pada RPJMN 2015-2019, Nawa cita menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa cita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain Kedaulatan Pangan yang ada dalam Nawa cita, juga terdapat Peningkatan Agroindustri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dan Agroindustri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat hingga 8,0 persen, tumbuhnya investasi 12,1 persen, serta ekspor yang diperkirakan tumbuh 12,2 persen di tahun 2019. Melalui upaya ketahanan pangan dan agroindustri, diharapkan sektor pertanian tumbuh 4,5 persen pertahun.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan revisi kedua untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 yang juga mengalami revisi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian Pertanian adalah **Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

Selaras dengan visi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki visi **“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura”** dengan misi yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Hortikultura adalah **“Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura”** dengan indikator tujuan sebagai berikut :

TUJUAN	Indikator tujuan	Target 2018
Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura	PDB hortikultura per jumlah tenaga kerja hortikultura	Rp 35 juta

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2018
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional (SS3)	1 Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian nasional	%	8,97
	a Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	2,83
	2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	%	5,02
	b Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	%	7,38

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2018
Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional (SS4)	3 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	%	5,9
	a Produksi cabai	Ton	2,245,440
	b Produksi bawang merah	Ton	1,608,766
Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan (SS8)	4 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pascapanen)	%	66,3
	a Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pascapanen hortikultura	%	90
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI serta penyakit pada hewan (SS9)	5 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	%	11,05
	a Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	5

2.1.3 Strategi

Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan hortikultura 2015 – 2019 diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain:
 - 1.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

- 1.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
- 1.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
2. Peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura melalui :
 - 2.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
3. Peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat,
 - 3.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

- 3.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
4. Pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura,
 - 4.1. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
 - 4.2. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - 4.3. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - 4.4. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - 4.5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - 4.6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
5. Peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
 - 5.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

- 5.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- 5.6. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura.
6. Peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas layanan kelembagaan dalam Pengembangan Hortikultura
 - 6.1. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
 - 6.2. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - 6.3. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - 6.4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura.

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi pembangunan hortikultura 2015-2019 fokus pada usaha pengembangan kawasan, pengembangan sistem perbenihan, pengembangan sistem pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura, pengembangan sistem perlindungan, serta tata kelola manajemen, Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1). Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura

- a) Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta registrasi kebun/lahan usaha.
- b) Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju kemandirian usaha hortikultura.
- c) Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan pola produksi dan penanganan pascapanen.

2). Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

- a) Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan hortikultura
- b) Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk kemandirian benih dalam negeri
- c) Fasilitasi sarana prasarana perbenihan untuk menghasilkan benih bermutu
- d) Pemasyarkatan dan promosi penggunaan benih bermutu

3). Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

- a) Perlindungan Tanaman Berbasis Sistem PHT
- b) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BPTPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab, Pestisida, Klinik PHT dan PPAH)
- c) Peningkatan Pengendalian OPT Hortikultura Penanganan Dampak Perubahan Iklim

4). Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura

- a) Fasilitasi Gudang/Bangsal pascapanen
- b) Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen
- c) Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan
- d) Jumlah *Cold Storage* Hortikultura
- e) Fasilitasi Hortipark
- f) Fasilitasi Pemasaran Hortikultura
- g) Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

5). Tata Kelola Manajemen

- a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja
- b) Peningkatan pengendalian internal
- c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi
- d) Peningkatan pengelolaan aset
- e) Peningkatan aspek kehumasan
- f) Pengelolaan regulasi hortikultura
- g) Pengelolaan Sumber daya hortikultura

2.1.5 Program dan Kegiatan

Sesuai Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2015-2019 (Edisi Revisi) ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura,

Pencapaian Program tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
4. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
6. Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

2.1.6 Langkah Operasional

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk mempertajam pencapaian strategi pembangunan hortikultura 2015 - 2019 dilakukan melalui **Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura** dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

- Pengembangan kawasan cabe dan bawang merah
- Pengembangan kawasan sayuran lainnya dan tanaman obat
- Pengembangan Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
- Penerapan GAP
- Registrasi Lahan Usaha
- Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
- Penyediaan teknologi cabai dan bawang merah

b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

- Pengembangan kawasan jeruk, mangga, manggis dan pisang

- Pengembangan kawasan buah lainnya
- Pengembangan Kawasan buah di wilayah perbatasan
- Pengembangan kawasan florikultura
- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
- Penerapan GAP
- Registrasi kebun
- Registrasi Lahan Usaha
- Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
- Penyediaan teknologi budidaya buah dan florikultura

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

- Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawah merah
- Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya
- Fasilitasi petugas informasi pasar
- Fasilitasi pasar lelang dan pasar tani
- Penyediaan teknologi pascapanen cabai dan bawang merah
- Fasilitasi jaminan mutu produk hortikultura
- Fasilitasi Dokumen Sistem Jaminan Mutu

d. Pengembangan sistem perbenihan hortikultura

- Penguatan kelembagaan perbenihan
- Penumbuhan industri benih
- Penyediaan benih sumber hortikultura
- Penyediaan benih sebar hortikultura bermutu
- Sertifikasi Benih
- Sarana dan Prasarana Perbenihan

e. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura

- Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman cabai dan bawang merah
- Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura lainnya
- Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman
- Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan

- Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sum infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksploratif
- Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim
- Penyediaan teknologi pengendalian OPT hortikultura
- Desa organik berbasis tanaman hortikultura

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura telah sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2015-2019 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target *outcome* yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya. Dokumen IKSP dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

Target kinerja yang ditetapkan pada RKT memiliki nilai yang sama dengan target kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada bulan Januari 2018. Namun diperjalanan waktu ada perubahan pada PK revisi pada bulan Juli 2018.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	2,83 %
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	7,38 %
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3. Produksi cabai	2,245,440 Ton
	4. Produksi Bawang Merah	1,608,766 Ton
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pascapanen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura)	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5 %
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82,50 Nilai
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	73,75 Nilai

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura, 2018

2.3 Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2019 (Revisi II). Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada awalnya telah ditandatangani pada bulan Januari Tahun 2018 dan dalam perjalanan waktu Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan revisi sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juli dan Desember Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dan edisi Revisi PK dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	2.83 %
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	7.38 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3. Produksi cabai 4. Produksi Bawang Merah	2.245.440 Ton 1.608.766 Ton
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pascapanen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura)	100.00 %
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5.00 %
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82.50 Nilai
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	73.75 Nilai

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2018

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	2,83 %
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	7,38 %
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3. Produksi cabai	2.245.440 Ton
	4. Produksi Bawang Merah	1.608.766 Ton
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pascapanen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura)	90,00 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5,00 %
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82,50 Nilai
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	73,75 Nilai

Sumber: PK Revisi Ditjen Hortikultura Tahun 2018

Perbedaan PK awal dan PK revisi Ditjen Hortikultura Tahun 2018 terdapat pada target rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura) yaitu dari 100% menjadi 90%. Pada bulan Juli 2018 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mengalami pemotongan anggaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mengalami perubahan. Perubahan ini didasarkan atas arahan pimpinan untuk menyesuaikan kinerja agar lebih realistik. Perubahan ke dua di bulan Desember 2018 dimana anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura di Pusat berkurang yaitu alokasi tunjangan kinerja dilimpahkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tahun 2018 dan edisi Revisi PK bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 6, 7 dan 8.

Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura diukur melalui indikator kinerja: 1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura, dan 2) Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura. Sasaran strategis kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura diukur melalui indikator kinerja produksi cabai dan bawang merah. Sasaran strategis ketiga yaitu tersedianya infrastruktur pertanian pascapanen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan diukur melalui rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura). Sasaran strategis keempat yaitu terkendalinya

penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura diukur melalui rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura. Terakhir, sasaran strategis kelima yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura diukur melalui indikator kinerja: 1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan 2) Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2018 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 5 (lima) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2018 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2018 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan Tahun 2019.

Pengambilan data pada indikator kinerja sasaran program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. Masukkan data volume ekspor untuk setiap komoditas pertanian hortikultura yang ditentukan (yaitu mangga, nenas, manggis, salak, pisang, krisan, kentang, jamur dan jahe) sebagai target komoditas ekspor

- hortikultura untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Sumber data adalah dari BPS
- b. Masukkan data seluruh komoditas ekspor pertanian hortikultura sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1)
 - c. Hitung pertumbuhan volume ekspor pertanian hortikultura untuk komoditas ekspor pertanian hortikultura berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\text{Volume ekspor pertanian hortikultura (t)} - \text{Volume ekspor pertanian hortikultura (t-1)}}{\text{Volume ekspor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Memasukkan data volume impor untuk setiap komoditas pertanian hortikultura yang ditentukan (yaitu jeruk dan bawang putih) sebagai target komoditas substitusi impor hortikultura untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t - 1). Sumber data adalah dari BPS
- b. Memasukkan data seluruh komoditas substitusi impor pertanian hortikultura sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t - 1)
- c. Hitung penurunan volume impor produk pertanian hortikultura untuk setiap komoditas substitusi impor pertanian hortikultura berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\text{Volume impor pertanian hortikultura (t)} - \text{Volume impor pertanian hortikultura (t-1)}}{\text{Volume impor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

3. Produksi cabai dan bawang merah

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menaksir produksi hortikultura sebagai berikut:

- a. Informasi dari Petani/Kelompok Tani,
Petugas dapat menanyakan langsung kepada Petani/Kelompok Tani mengenai jumlah pohon yang ditanam dan telah berproduksi pada periode laporan.
- b. Laporan Petani kepada Kepala Desa
Petani biasanya melaporkan kepada Ketua Kelompok/Kontak Tani lebih dahulu dan Ketua Kelompok/Kontak Tani ini melaporkan kepada Kepala Desa, tetapi ada juga petani yang langsung melaporkan kepada Kepala Desa tanpa melalui Ketua Kelompok/Kontak Tani.

c. Banyaknya Benih yang Digunakan

Dengan mendasarkan pada banyaknya benih yang digunakan, petugas akan bisa mengetahui jumlah tanaman yang akan dijadikan dasar dalam menaksir jumlah produksi.

d. *Eye Estimate* (Perkiraan Pengamatan Lapang) berdasarkan luas baku dan jarak tanam.

e. Metode ini selain digunakan untuk penaksiran luas lahan selanjutnya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir produksi, dengan syarat bahwa yang melakukan taksiran adalah pegawai/petugas desa yang sudah berpengalaman.

f. Informasi Lain

Sumber informasi lain yang dapat digunakan adalah Pedagang Pengumpul yang biasanya melakukan penaksiran produksi pada tanaman yang akan dipanen/dibeli, Asosiasi, Koperasi dan lain – lain.

4. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. melakukan analisis kebutuhan alsintan pascapanen, kebutuhan alsintan pascapanen diambil dari pengajuan awal Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L).

b. menghitung jumlah alsintan yang tersedia untuk pascapanen dengan cara menghitung alsintan pascapanen yang telah diberikan kepada petani.

c. melakukan perbandingan antara kebutuhan dan pengadaan alsintan dengan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\sum \text{Alsintan yang tersedia untuk pasca panen}}{\sum \text{Kebutuhan alsintan untuk pasca panen}} \right) \times 100\%$$

d. Data yang digunakan dalam perhitungan ini bersumber dari Subdirektorat Pascapanen, Direktorat Pascapanen dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

5. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura penghitungannya dilakukan dengan cara :

a. Hitung luas tanam seluruh komoditas tanaman hortikultura nasional, komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor pada tahun berjalan

b. Hitung luas serangan OPT dan DPI pada tahun berjalan yang menyebabkan gagal panen pada tanaman hortikultura, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat

merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen No 6 tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Sumber data dari Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat, dan Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam – Direktorat Perlindungan Hortikultura.

- c. Hitung rasio luas serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam pada tanaman hortikultura dengan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\sum \text{Luas serangan OPT dan DPI tanaman hortikultura tahun berjalan}}{\sum \text{Luas tanam tanaman hortikultura tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan dengan cara melihat hasil penilaian AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
7. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) dapat dilihat dari aplikasi Smart Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 . Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	%	Kategori
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	2,83 %	41,14 %	1.454	Sangat berhasil
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	7,38 %	7,62 %	103,25	Sangat berhasil
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan	3. Produksi cabai	2.245.440 Ton	2.523.928 Ton**	112,40	Sangat berhasil

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	%	Kategori
strategis tanaman hortikultura	4. Produksi Bawang Merah	1.608.766 Ton	1.498.659 Ton**	93,15	Berhasil
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pascapanen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura)	90,00 %	100,00 %	111,11	Sangat berhasil
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5,00 %	3,67 %	136,24	Sangat berhasil
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82,50	83,97	101,78	Sangat berhasil
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	73,75	79,44	107,72	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2018

Keterangan: *) Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2018

**) Berdasarkan Angka Sementara Tahun 2018.

3.2.1. Evaluasi dan analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018, dari 8 (delapan) indikator kinerja menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura, penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura, produksi cabai, rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura) dan nilai kerja, rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura serta nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja lainnya dengan kategori berhasil yaitu produksi bawang merah.

3.2.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura

Sasaran Program nomor pertama ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura dan (2) Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura.

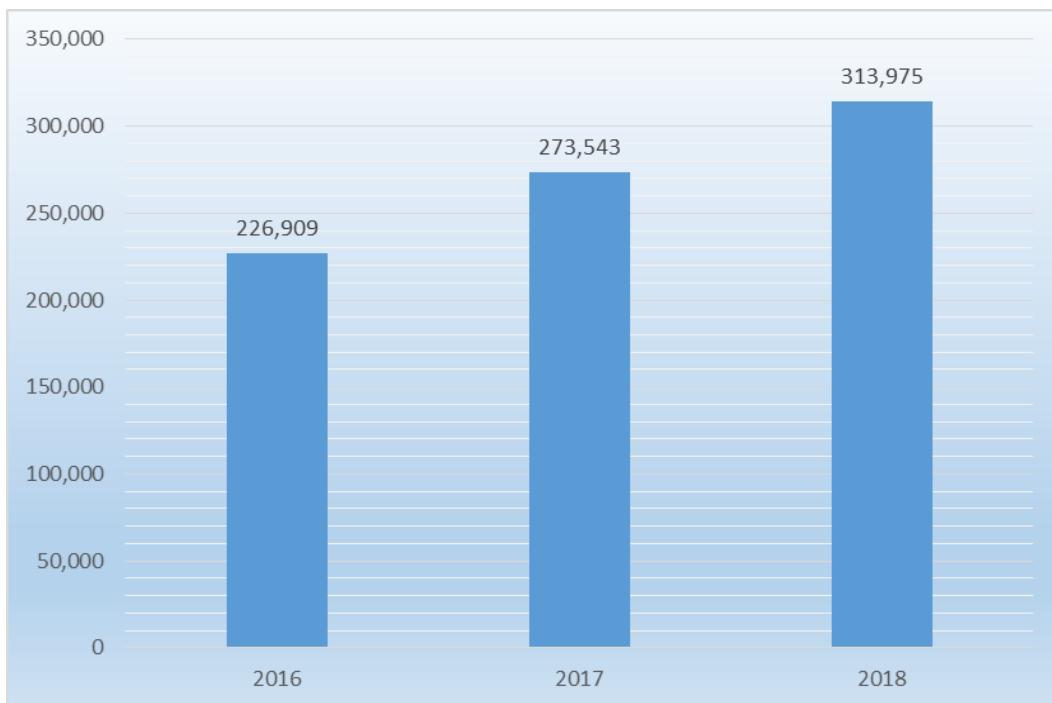
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura pada tahun 2018 untuk 9 (sembilan) komoditas hortikultura yaitu kentang, jamur, mangga, manggis, nanas, pisang, salak, jahe, dan krisan dapat dilihat pada Tabel 6. Rata - rata pertumbuhan volume ekspor dari 9 (sembilan) komoditas tersebut adalah sebesar 41,14 % atau sebesar 1.454 % dari target sebesar 2,83 %, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Komoditas hortikultura yang memiliki pertumbuhan ekspor positif pada adalah manggis (323,60%), pisang (67,10%), jamur (32,32%), salak (27,64%), nanas (8,80%), dan mangga (1,90%).

Tabel 6. Volume Ekspor Komoditas Hortikultura (ton) dan Pertumbuhan Ekspor (%)

No.	Komoditas	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2017	2018	
1	Kentang	5.215	5.163	-1,00
2	Jamur	3.029	4.008	32,32
3	Mangga	2.520	2.568	1,90
4	Manggis	9.167	38.831	323,60
5	Nanas	210.046	228.537	8,80
6	Pisang	18.177	30.373	67,10
7	Salak	966	1.233	27,64
8	Jahe	24.362	3.203	-86,85
9	Krisan	61	59	-3,28
	Rata - rata	29,376	34,886	41,14

Sumber : BPS, 2019

Pada 3 (tiga) tahun terakhir Volume ekspor produk pertanian hortikultura mengalami peningkatan seperti pada Grafik 1, dimana volume ekspor tahun 2016 sebesar 226.909 ton, Tahun 2017 sebesar 273.543 ton dan Tahun 2018 sebesar 313.975 ton, dengan rata – rata pertumbuhan volume ekspor sebesar 17,67 %.



Sumber : BPS, 2019

Keterangan : Volume ekspor komoditas hortikultura yang meliputi kentang, jamur, mangga, manggis, nanas, pisang, salak, jahe dan krisan (dalam satuan ton)

Gambar 1. Volume Eksport Komoditas Hortikultura Tahun 2016 – 2018

Manggis menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia karena kekhasannya dan dikenal sebagai *the queen of tropical fruit*. Selama ini manggis telah banyak dieksport ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Hong Kong, Uni Emirat Arab dan Perancis dengan volume ekspor per tahunnya yang cenderung meningkat. Peluang ekspor untuk komoditas ini semestinya dapat dimanfaatkan melalui peningkatan produksi dan mutu salah satunya dengan dukungan pengembangan kawasan manggis melalui APBN.

Salah satu negara yang menjadi peluang tujuan ekspor manggis terbesar adalah Cina. Namun, sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 manggis Indonesia dilarang masuk ke Cina. Penolakan ekspor manggis Indonesia tersebut terjadi pada tahun 2010, diawali dengan adanya informasi dari Pemerintah Cina yang menyatakan manggis Indonesia mengandung Kadmium (Cd). Sejak kejadian tersebut manggis Indonesia masuk ke Cina melalui pihak ketiga, dimana ironisnya manggis Indonesia yang masuk ke Cina akhirnya tercatat sebagai produk ekspor Malaysia dan Thailand. Dengan berbagai usaha, akhirnya upaya pemerintah

Indonesia mengalami perkembangan dimana pada Tahun 2017 telah ditandatangani protokol impor antara Pemerintah Indonesia dengan Cina, sehingga manggis Indonesia dapat kembali diekspor ke negara tersebut, dengan mempersyaratkan manggis yang diekspor berasal dari kebun yang telah terregistrasi GAP.

Hasil dari penandatangan protokol impor tahun 2017 adalah dieksporanya manggis Indonesia ke Cina pada awal tahun 2018 dimana peresmian *launching* eksporanya dilaksanakan di bandara Soekarno Hatta. Diawali dengan manggis Purwakarta dan Subang kemudian disusul oleh manggis dari Tabanan (Bali) dan Lima Puluh Kota (Sumatera Barat), diharapkan manggis-manggis dari daerah lain dapat mengikuti manggis unggulan tersebut untuk diekspor. Dalam rangka mendukung dan mempersiapkan ekspor manggis ke Cina, dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang Direktorat Buah dan Florikultura bersama Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten sentra manggis telah melakukan kegiatan registrasi kebun manggis dan *surveillance* kebun-kebun manggis yang telah habis masa berlakunya (lebih dari 2 tahun).



Gambar 2. *Launching* Ekspor manggis dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober 2018.

Pencapaian ini ditunjang oleh adanya dukungan kegiatan sepanjang tahun 2018 yaitu :

1. Melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura
2. Pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP terutama untuk komoditas potensi ekspor
3. Mendorong percepatan registrasi kebun dalam memenuhi persyaratan ekspor
4. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengajuan registrasi rumah kemasan.
5. Mendorong kemitraan usaha antara kelembagaan tani dengan perusahaan eksportir dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu ekspor
6. Bimbingan teknis pengendalian OPT

Upaya yang terus dilakukan di masa mendatang agar pertumbuhan ekspor produk hortikultura meningkat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya perluasan pasar untuk komoditas hortikultura potensial ekspor
2. Membuat prioritas alokasi pengembangan kawasan untuk tujuan ekspor dengan pendampingan intensif dan prioritas berikutnya kawasan reguler untuk memenuhi pasar domestik
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas setempat untuk mempercepat registrasi kebun
4. Meningkatkan upaya pembinaan dan pendampingan pengajuan pendaftaran rumah kemasan
5. Membangun kelembagaan hortikultura yang mandiri dalam bentuk kooperasi untuk dapat bermitra dengan perusahaan
6. Melaksanakan bimbingan teknis pengendalian OPT secara kontinu.

Direktorat Jenderal Hortikultura selain berusaha meningkatkan ekspor komoditas hortikultura, juga berusaha menurunkan impor untuk 2 (dua) komoditas yaitu jeruk dan bawang putih. Target penurunan 2 (dua) komoditas itu adalah sebesar 7,38 %. Sepanjang Tahun 2018, volume impor jeruk sebesar 95,962 ton dan bawang putih sebesar 587.942 ton. Jika dibandingkan dengan impor tahun 2017,

maka impor jeruk mengalami penurunan sebesar 20,27 % dan bawang putih mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 %. Rata - rata penurunan impor untuk 2 (dua) komoditas ini pada Tahun 2018 adalah 7,62 %. Dengan demikian, realisasi penurunan impor komoditas jeruk dan bawang putih Tahun 2018 sebesar 103,25 % dari target sebesar 7,38% atau masuk kategori sangat berhasil.

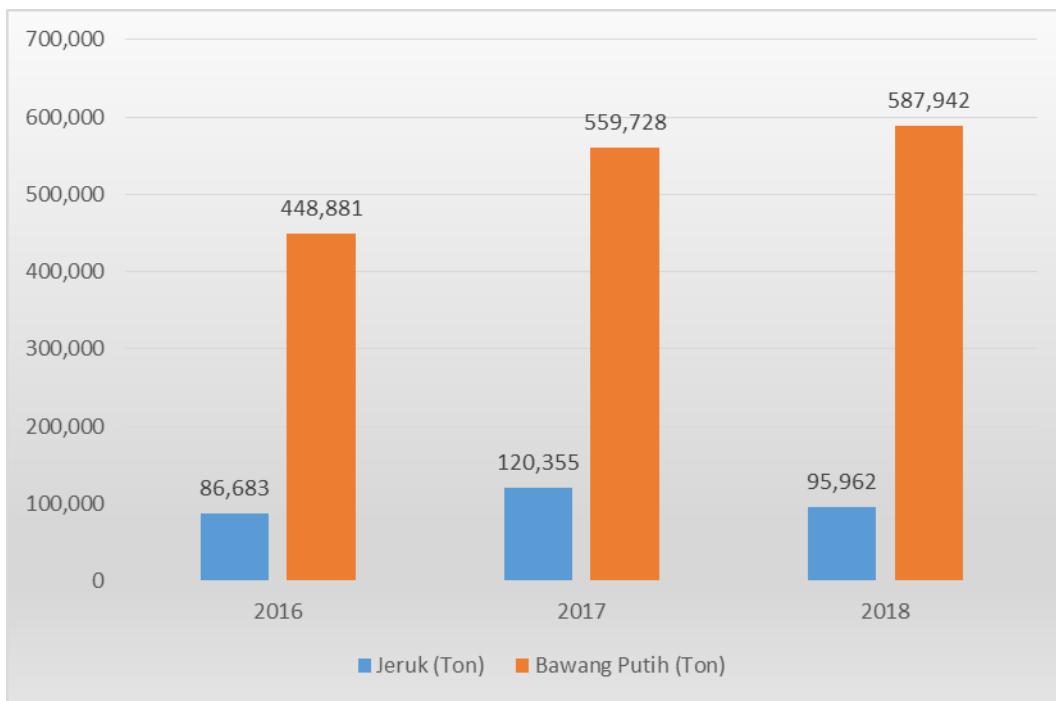
Tabel 7. Volume Impor Komoditas Hortikultura (ton) dan Penurunan Impor (%)

No,	Komoditas	Tahun		Penurunan (%)
		2017	2018	
1	Jeruk	120,355	95,962	-20,27
2	Bawang Putih	559,728	587,942	5,04
Rata - Rata				-7,62

Sumber : BPS, 2019

Volume impor jeruk dan bawang putih pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 4. Impor jeruk mengalami fluktuatif pada 3 tahun, pada Tahun 2016 sebesar 86.683 ton, meningkat 38,84% pada Tahun 2017 menjadi 120.355 ton dan menurun 20,26% pada Tahun 2018 menjadi 95.962 ton. Impor bawang putih pada tahun 2017 sejumlah 559.728 ton meningkat sebesar 24,7 % dibandingkan Tahun 2016, sedangkan impor pada tahun 2018 sejumlah 587.942 ton atau meningkat sebesar 5,04 % dibandingkan Tahun 2017. Ini menunjukkan adanya penurunan persentase pertumbuhan impor jeruk dan bawang putih.

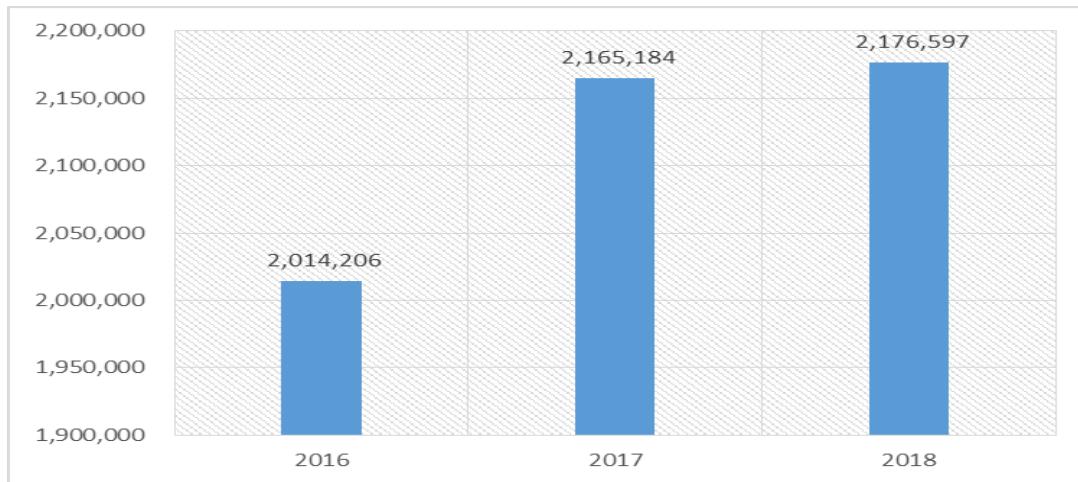
Volume impor bawang putih pada Tahun 2018 didalamnya termasuk impor benih bawang putih sejumlah 1.917 ton, benih ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan bawang putih Tahun 2018 dan kewajiban tanam dari importir bawang putih. Benih bawang putih berasal dari Taiwan dikenal dengan *Great Black Leaf* (GBL) yang memiliki kemiripan DNA dengan varietas Sangga Sembalun. Oleh karena itu, benih GBL dapat dijadikan benih untuk pengembangan kawasan bawang putih Tahun 2018 dan memenuhi kewajiban dari importir bawang putih konsumsi untuk melakukan penanaman bawang putih paling sedikit menghasilkan produksi 5% dari volume permohonan RIPH per tahun.



Sumber : BPS, 2019.

Gambar 3. Volume Impor Komoditas Jeruk dan Bawang Putih Tahun 2016 – 2018

Penurunan impor komoditas jeruk Tahun 2018 diiringi dengan semakin meningkatnya produksi jeruk dalam negeri sebagai komoditas substitusi impor. Produksi jeruk pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut 2.014.206 ton pada Tahun 2016, 2.165.184 ton pada Tahun 2017 dan 2.176.597 ton pada Tahun 2018. Peningkatan produksi jeruk dilakukan dengan melakukan pengembangan kawasan jeruk sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan konsumsi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai subsitusi impor. Dengan adanya pengembangan jeruk tahun 2018 sebesar 1.870 ha, diharapkan kawasan jeruk dapat bertambah luas dan semakin berkembang, serta produksi jeruk meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan jeruk dalam negeri sekaligus dapat mengurangi impor jeruk.



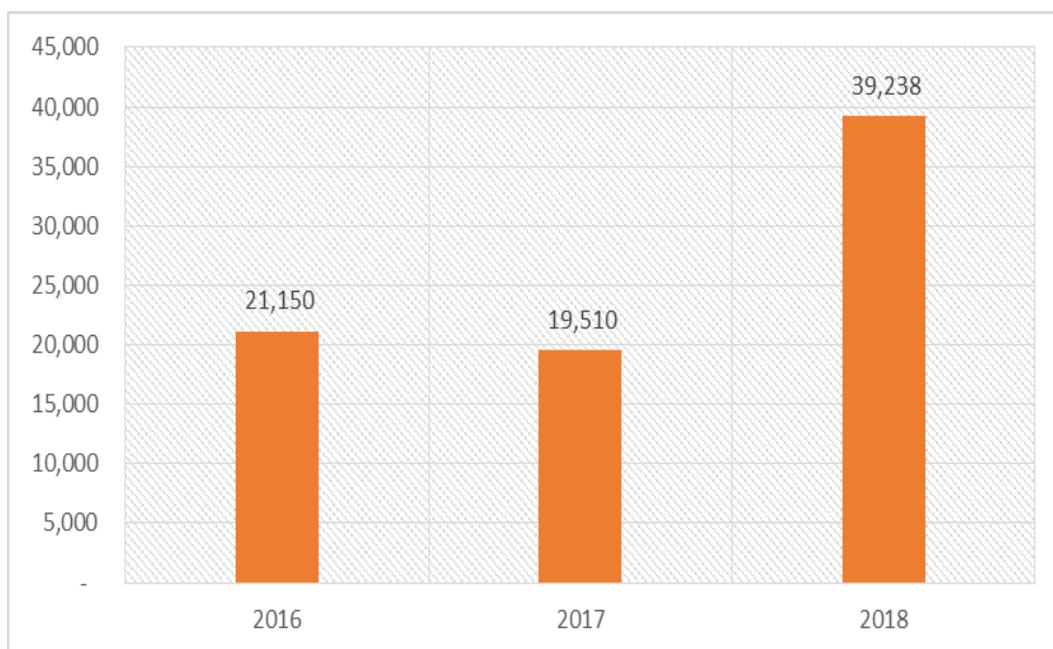
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, Angka Sementara Tahun 2018

Gambar 4. Produksi Jeruk (Ton) Tahun 2016 - 2018



Gambar 5. Pengembangan Kawasan Jeruk Tahun 2018

Produksi bawang putih pada Tahun 2016 sebesar 21.150 ton, 19.510 ton pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 39.238 ton pada Tahun 2018. Peningkatan produksi bawang putih pada Tahun 2018 karena adanya upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor yang dilakukan melalui langkah-langkah terpadu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, simultan, terfokus dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Upaya memacu laju peningkatan kuantitas dan kualitas produksi bawang putih di Indonesia antara lain dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih melalui perluasan areal dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha sayuran di sentra-sentra produksi. Target pengembangan kawasan bawang putih Tahun 2018 adalah seluas 5.949 Ha di 18 Provinsi, luasnya target kawasan pengembangan bawang putih ini merupakan upaya dalam rangka menuju swasembada bawang putih Tahun 2021.



Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, Angka Sementara Tahun 2018

Gambar 6. Produksi Bawang Putih (Ton) Tahun 2016 – 2018



Gambar 7. Pengembangan Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Bandung, Solok, Cianjur dan Magelang

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan impor komoditas substitusi impor adalah :

1. Pengembangan kawasan jeruk dengan melakukan pembinaan, pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi sarana produksi.
2. Pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional dan mencapai swasembada pada Tahun 2021, dengan melakukan pembinaan, pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi sarana produksi.
3. Untuk mendukung pengembangan kawasan telah dilakukan upaya meningkatkan ketersediaan benih dalam negeri seperti mendorong pengembangan benih bermutu varietas unggul, merevisi peraturan perbenihan untuk mendukung swasembada bawang putih, melakukan penjajakan ketersediaan benih bawang putih di beberapa negara dan melakukan kerjasama dengan BUMN dalam penyediaan benih bawang putih.

Upaya yang terus dilakukan di masa mendatang agar penurunan impor komoditas substitusi impor dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kawasan pengembangan kawasan jeruk dan bawang putih, prioritas pengembangan kawasan jeruk dengan menggunakan varietas unggulan yang potensial di lokasi/kawasan yang tepat, yang didukung oleh SDA dan SDM yang sesuai
2. Terus melakukan upaya pembinaan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan petani dan meningkatkan produktivitas bawang putih.
3. Meningkatkan ketersediaan benih bermutu untuk komoditas jeruk dan bawang putih.

3.2.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Strategis Tanaman Hortikultura

Sasaran Program nomor 2 memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) produksi cabai dan (2) produksi bawang merah.

Produksi cabai pada tahun 2018 sebesar 2.523.928 ton atau 112,40 % dari target sebesar 2.245.440 ton, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit sebesar 1.331.559 ton dan cabai besar sebesar 1.192.369 ton. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, produksi cabai cenderung meningkat disetiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 9,89 %.



Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, Angka Sementara Tahun 2018

Gambar 8. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 – 2018

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2018 melalui pengaturan pola tanam, menekan biaya produksi dengan pengendalian OPT ramah lingkungan, penerapan irigasi hemat air, penggunaan mulsa, dan pemberdayaan champion.

Pengaturan pola tanam aneka cabai dilakukan secara nasional yang kemudian dirinci menjadi pola tanam provinsi dan kabupaten. Setiap daerah mempunyai target untuk menyediakan luas tanam baru setiap bulannya. Tujuan pengaturan pola tanam ini adalah agar dapat mengatur keseimbangan *supply demand* sehingga stabilisasi pasokan dan harga dapat terjaga yang akhirnya berdampak pada berkurangnya inflasi. Secara umum terbukti bahwa produksi dan harga aneka cabai masih terjaga stabil sepanjang tahun 2018, meskipun di beberapa provinsi/kabupaten/kota terdapat gejolak harga yang disebabkan daerah tersebut belum optimal dalam penerapan pola tanam cabai dan masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Berdasarkan hasil analisa usaha tani cabai, penggunaan pestisida kimia memberikan kontribusi biaya produksi sebesar 30 - 40 %. Namun, dengan penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui penggunaan pestisida nabati, perangkap hama, likat kuning, tanaman border, dan pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya, kontribusi biaya produksinya lebih rendah, yaitu hanya sekitar 10 - 15%. Saat ini petani per kelompok tani mulai menyadari, bahwa pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida kimia, membutuhkan biaya yang lebih tinggi, sehingga petani atau kelompok tani secara bertahap mulai menerapkan budidaya cabai secara ramah lingkungan. Selain menjaga kondisi ekosistem yang lebih sehat bagi tanah, pengendalian OPT ramah lingkungan juga menghasilkan cabai yang aman dikonsumsi.

Penerapan irigasi hemat air melalui sistem irigasi tetes pada usaha tani cabai dilakukan untuk menjaga kestabilan pasokan cabai saat musim kemarau, Meskipun debit air berkurang, namun kegiatan usaha tani cabai tetap dapat dilakukan oleh petani. Melalui penerapan irigasi hemat air dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan efisiensi tenaga kerja.

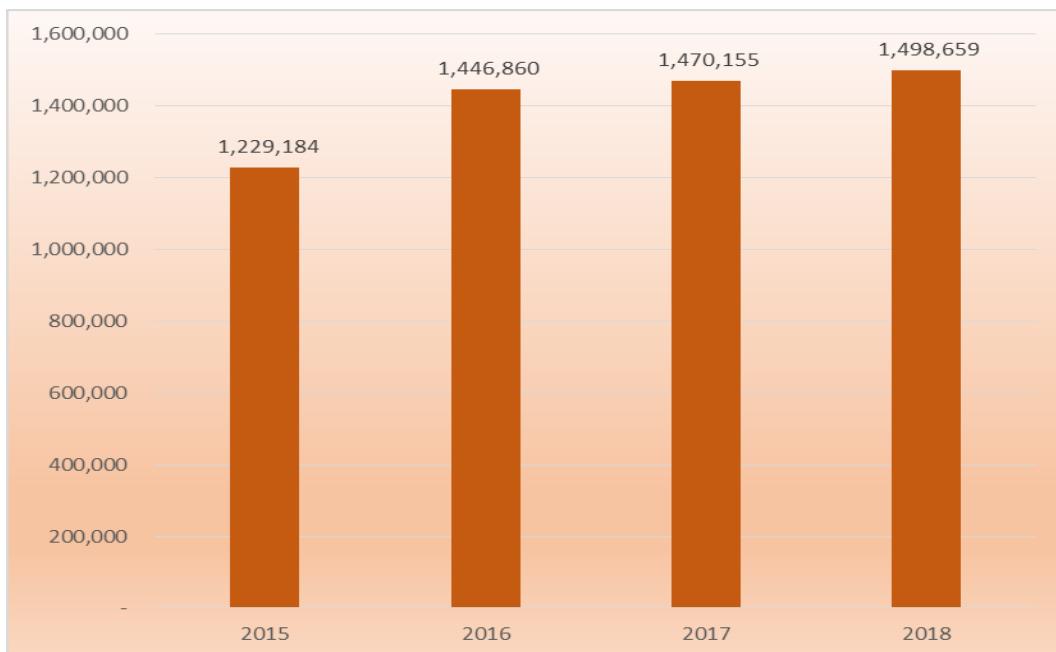
Umumnya sistem irigasi tetes dipadukan dengan penggunaan mulsa plastik hitam perak yang memberikan manfaat untuk menjaga kelembaban tanah, menghindarkan tanaman dari serangan hama bawah daun (silau karena pantulan sinar matahari), misalnya: aphid, tungau, thrips, ulat, serta jamur atau cendawan

dan menghambat tumbuhnya gulma, sehingga tanaman cabai dapat berproduksi optimal.

Champion cabai sudah terbentuk secara resmi pada awal tahun 2018. Namun perannya sudah dapat dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu berperan dalam menjaga kestabilan produksi dan harga melalui dukungan kepada Dinas Pertanian di wilayah masing-masing dalam pembinaan kepada petani / kelompok tani cabai dalam hal pola tanam, budidaya ramah lingkungan, pemasaran, pascapanen, dan sosialisasi program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Untuk tahun-tahun selanjutnya beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk dapat mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai adalah menyusun pola tanam 2019 baik berdasarkan SPH dan kebutuhan riil, menghitung kebutuhan dan luas panen riil cabai per kabupaten per provinsi tahunan, konsistensi daerah untuk melaksanakan manajemen pola tanam, mendorong percepatan proses pengadaan APBN, sosialisasi *log book* dan sistem budidaya ramah lingkungan serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan champion.

Indikator kinerja lain pada sasaran program terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura adalah produksi bawang merah. Pada Tahun 2018 produksi bawang merah mencapai 1.498.659 ton atau 93,15 % dari target sebesar 1.608.766 ton sehingga masuk kategori berhasil. Produksi bawang merah sepanjang tahun 2015 sampai 2018 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,09 %.



Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, Angka Sementara Tahun 2018

Gambar 9. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 - 2018

Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi bawang merah Tahun 2018 adalah pengaturan pola tanam, pengembangan bawang merah di luar pulau Jawa yang memiliki potensi lahan yang baik, sosialisasi bawang merah biji melalui program kawasan bawang merah biji (TSS) serta penguatan peran champion bawang merah.

Pola tanam bawang merah diatur melalui pertemuan manajemen pola tanam, yang dilakukan di awal tahun khusus untuk membahas target Luas Tanam dan Luas Panen per bulan per provinsi. Setiap provinsi memiliki target bulanan yang akan di *breakdown* sampai ke tingkat kecamatan. Pemantauan Luas Tambah Tanam dilakukan harian oleh mantri tani atau Petugas Penyuluh Lapang (PPL), yang kemudian dilaporkan ke pusat. Melalui manajemen pola tanam, ditentukan daerah-daerah yang dapat menjadi penyanga saat *off season* yaitu di bulan basah dimana biasanya terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan, Pengalokasian APBN juga diarahkan untuk pertanaman *off season*.

Pengembangan kawasan bawang merah bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta

kesejahteraan petani, melalui fasilitasi sarana produksi dan sarana budidaya serta penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang merah, stabilisasi pasokan dan perbaikan mutu, dan pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi. Target pengembangan kawasan bawang merah pada Tahun 2018 adalah seluas 5.493 Ha di 33 Provinsi yang terdiri dari 1.621 ha pengembangan kawasan di Pulau Jawa dan 3.872 ha pengembangan kawasan di luar Jawa. Pengembangan kawasan bawang merah diluar Jawa dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kawasan sentra bawang merah dan penyebaran produksi bawang merah sehingga tidak tergantung dengan daerah sentra di Pulau Jawa dan terjadinya stabilisasi pasokan.

Petani bawang merah telah terbiasa menggunakan benih umbi, yang menyulitkan petani adalah pada saat benih umbi harganya melonjak tinggi sehingga menambah biaya produksi dan beban ongkos kirim bagi petani yang sangat tergantung pasokan benih dari luar wilayahnya. Untuk itu di tahun 2018 dilaksanakan sosialisasi pengembangan bawang merah biji melalui program kawasan bawang merah biji (TSS) di 22 provinsi, 63 kabupaten dengan total luasan sebanyak 199 ha. Lokasi terbesar adalah di Kabupaten Belu dan Grobogan dengan total luasan 70 Ha. Kelebihan penggunaan benih biji adalah produktivitas lebih tinggi mencapai 20 - 25 ton/ha, biaya produksi lebih rendah dan efisien dikarenakan biaya untuk pembelian benih biji lebih rendah dibandingkan dengan biaya pembelian benih umbi dan biaya pemupukan lebih efisien, serta tahan terhadap serangan OPT bila dibandingkan dengan benih umbi. Untuk kegiatan pengembangan bawang merah biji diharapkan mendapat pendampingan khusus dari penyedia benih hal ini dikarenakan petani bawang merah masih terbiasa menggunakan benih umbi.

Peran champion bawang merah terhadap produksi bawang merah atau stabilisasi pasokan dan harga diantaranya adalah champion berperan dalam menginformasikan perkembangan bawang merah khususnya di wilayah-wilayah sentra. Champion berperan sebagai corong program pemerintah, sehingga program pemerintah terutama terkait pola tanam dan teknologi budidaya dapat lebih cepat tersosialisasi ke petani, serta berperan dalam membantu stabilisasi harga jika diperlukan.

Akar permasalahan belum tercapainya produksi bawang merah Tahun 2018 disebabkan antara lain :

- Harga bawang merah yang sempat jatuh dan stabil rendah sehingga menurunkan minat petani untuk menanam bawang merah.
- Kondisi kering/musim kemarau yang cukup panjang berpengaruh signifikan terhadap produksi dan produktivitas terutama di wilayah sentra.
- Di beberapa wilayah, terjadi peralihan tanam dari bawang merah menjadi komoditas lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan antara lain :

- Menjaga pola tanam sehingga panen lebih terukur. Hal ini untuk menghindari adanya over produksi yang menyebabkan harga jatuh di tingkat petani. Salah satunya dengan memperkuat peran champion untuk menjaga manajemen tanam di lapangan. Serta menerapkan *ceiling* dan *floor price* untuk menjaga harga di tingkat petani sampai konsumen.
- Menyediakan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan (jika harga rendah), gudang berpendingin untuk memperpanjang umur simpan bawang merah sebagai *buffer stock* pemerintah, alat dan mesin pengolahan bawang merah.
- Melakukan upaya meyakinkan petani agar tetap memiliki minat tanam bawang merah seperti menjaga stabilitas harga dan memfasilitasi sarana pascapanen

3.2.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Tersedianya Infrastruktur Pertanian Pascapanen Tanaman Hortikultura Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Sasaran Program nomor 3 memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura).

Rasio tersedianya alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan pascapanen hortikultura tahun 2018 sebesar 100% dari target sebesar 90 % sehingga capaiannya sebesar 111 %. Pencapaian ini termasuk kategori sangat berhasil.

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanganan

pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan (*shelf life*), mempertahankan kesegaran (*vase life*), meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sarana, memberikan keuntungan yang optimum untuk pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk untuk siap jual.

Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal pascapanen atau gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun komoditas yang masif. Langkah operasional yang telah dilakukan antara lain fasilitasi peralatan pascapanen, pengadaan bangsal pascapanen, dan bimbingan teknis pascapanen.

Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Atau Mesin Pertanian adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pascapanen. Pascapanen berdasarkan Permentan 44 Tahun 2009 tentang Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) meliputi proses pascapanen yang merupakan tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Berdasarkan definisi ini, maka alsintan yang dimaksud di sini adalah fasilitasi sarana prasarana pascapanen, di luar bangsal pascapanen. Bangsal pascapanen tidak dimasukkan sebagai alsintan, karena bangsal pascapanen berupa bangunan. Oleh karena itu alokasi alsintan pascapanen pada Tahun 2018 berjumlah 60 unit dengan rincian pada Tabel 8.

Tabel 8. Fasilitasi Alsintan Pascapanen Hortikultura

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	ALSINTAN PASCAPANEN
1	Jawa Barat	2
2	Kab Bandung	1
3	Kab Sumedang	1
4	Kab Garut	1
5	Kab Majalengka	1
6	Kab Temanggung	1
7	Jawa Tengah	3
8	Magelang	1
9	Karanganyar	1
10	DIY	2
11	Jawa Timur	2
12	Banyuwangi	1
13	Malang	1
14	Lumajang	1
15	Aceh	2
16	Sumatera Utara	2
17	Simalungun	1
18	Sumatera Barat	2
19	Solok	1
20	Riau	1
21	Jambi	2
22	Sumatera Selatan	2
23	Lampung	3
24	Kalimantan Barat	1
25	Kalimantan Tengah	1
26	Kalimantan Selatan	1
27	Kalimantan Timur	2
28	Kalimantan Utara	1
29	Sulawesi Utara	1
30	Minahasa	1
31	Donggala	1
32	Enrekang	2
33	Sulawesi Selatan	1
34	Sulawesi Tenggara	2
35	Bali	1
36	Tabanan	1
37	Lombok Timur	1
38	Bengkulu	1
39	Banten	2
40	Bangka Belitung	1
41	Gorontalo	1
42	Kepulauan Riau	2
43	Bone	1
	JUMLAH	60

Alat mesin pascapanen yang disediakan antara lain motor roda-3, keranjang, timbangan, terpal, gerobak sorong, palet, blower/kipas angin dan trolley atau peralatan lain sesuai kebutuhan kelompok penerima dan merupakan komponen pilihan. Alasannya pascapanen di atas sudah diadakan (dilakukan pengadaan), diedarkan dan digunakan untuk keperluan pascapanen.



Gambar 10. Bantuan Alat Pascapanen

3.2.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Hortikultura

Sasaran Program Nomor 4 memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura.

Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura tahun 2018, telah berkontribusi terhadap pengamanan produksi hortikultura utama, melalui pengendalian OPT, serta adaptasi atau mitigasi DPI dan Bencana Alam. Disamping itu produk hortikultura yang dihasilkan aman konsumsi dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional.

Capaian pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT tahun 2018 ditunjukkan dengan rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam rata-rata sebesar 3,67% dari target maksimal 5%. Capaian tersebut relatif meningkat bila dibandingkan dengan rata-rata pencapaian tahun 2017 yaitu sebesar 4,70%.

Keberhasilan pengamanan produksi hortikultura ini antara lain disebabkan oleh peningkatan pengelolaan OPT hortikultura, koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku perlindungan, serta peningkatan sosialisasi/penyebarluasan informasi terkait pengelolaan OPT hortikultura.

Tabel 9. Perkembangan Luas Serangan OPT Dibandingkan Luas Tanam Hortikultura Tahun 2017-2018

No	Uraian	Nilai LS/LT *)	
		2017	2018
1	Cabai Luas Tanam, LT (Ha)** Luas Serangan OPT dan DPI, LS (Ha) Porsi LS/LT	334.958,76 23.268,30 6,95	370.180,88 21.480,30 5,80
2	Bawang Merah Luas Tanam, LT (Ha) ** Luas Serangan OPT dan DPI, LS (Ha) Porsi LS/LT	170.825,76 9.275,85 5,43	173.477,53 6.381,10 3,68
3	Hortikultura Lainnya Luas Tanam, LT (Ha) ** Luas Serangan OPT dan DPI, LS (Ha)*** Porsi LS/LT	527.503,32 9.161,35 1,74	542.628,9 8.263,3 1,52
Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam Tanaman Hortikultura		4,70	3,67

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2019

Keterangan :

- *) Nilai LS / LT, perbandingan luas serangan OPT terhadap luas tanam
- **) Luas tanam : diasumsikan 8% lebih besar dari luas panen
- ***) Data sementara, belum semua data terkumpul (data OPT dan data luas tanam)

Sayuran : cabai, bawang merah, Bawang putih, kentang
Buah : mangga, manggis, jeruk, pisang, nanas, salak

Penetapan perkembangan luas serangan OPT sebagaimana tersebut pada Tabel 8, mengacu pada jenis dan jumlah komoditas potensi ekspor dan substitusi impor yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, jeruk, pisang, mangga, manggis, nanas, salak, jahe, krisan, dan jamur. Dari ketigabelas komoditas tersebut, terdapat 3 (tiga) komoditas, dimana data luas serangan OPT belum terlaporkan dengan lengkap, yaitu jahe, krisan, dan jamur. Selain itu, yang terkait dengan data luas serangan OPT bawang putih mulai dilaporkan pada tahun 2018.

Dari kompilasi data sebagaimana tersebut di atas, bahwa melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 2018 berhasil mengamankan produksi sebesar 96,33%, dari target yang telah ditetapkan yaitu minimal 95%.

Penghitungan rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam sebagaimana tersebut pada Tabel 8 berdasarkan kelompok OPT utama, OPT lainnya, dan OPT kompleks. Pengelompokan OPT utama berdasarkan data luas serangan OPT tertinggi dari rekapitulasi data yang dilakukan secara periodik setiap bulan. Data luas serangan OPT Hortikultura Tahun 2017 dan 2018 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Data Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 2017 dan 2018 (Ha)

Komoditas	OPT	2017	2018
Cabai			
OPT Utama			
	Antraknosa	5.238,70	4.470,40
	Virus Kuning	4.944,90	4.557,40
	Trips	3.900,90	3.166,90
	Lalat Buah	3.845,90	3.704,80
	Kutu Daun	2.754,00	2.633,00
OPT Lainnya		2.484,70	1.837,40
Luas Serangan OPT Kompleks		17.676,70	16.851,70
		22.915,40	21.322,10
Bawang Merah			
OPT Utama			
	Ulat Bawang	8.177,70	5.352,20
	Trotol	4.639,90	3.400,40
	Layu Fusarium	2.302,70	1.279,20
	Mati Pucuk	815,30	424,50
	Antraknosa	318,70	146,70
OPT Lainnya		101,10	101,40
Luas Serangan OPT Kompleks		569,20	810,20
		8.746,90	6.162,40
Hortikultura lainnya *)			
OPT Utama		7.405,38	5.819,94
OPT Lainnya		1.755,96	2.443,40
Luas Serangan OPT Kompleks		9.161,35	8.263,34

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2019

Keterangan :

*) Bawang Putih, Kentang, Jeruk, Manggis, Mangga, Salak, Nenas, Pisang

Kehilangan hasil hortikultura akibat serangan OPT serta dampak perubahan iklim dan bencana alam adalah a) cabai 17.447,45 ton, b) bawang merah 7.574,47 ton, c) hortikultura lainnya 30.184,87 ton. Angka kehilangan hasil hortikultura lainnya hanya berdasarkan data luas serangan OPT kompleks karena data banjir dan kekeringan tidak terlaporkan dengan baik.

Pencapaian target kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura tahun 2018, dilaksanakan melalui tahapan dan komponen sebagai berikut :

1. Pembinaan dan bimbingan teknis pada Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) dan Klinik Pengendalian hama terpadu (PHT)

Tahun 2018 kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pada LPHP/LAH dan Klinik PHT dilaksanakan pada sentra produksi pengembangan kawasan hortikultura, di 150 unit LPHP/LAH dan Klinik PHT yang berada di 31 UPTD BPTPH.

Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan teknologi pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan yang diimplementasikan dengan perbanyak pengembangan agens hayati dan biopestisida/pestisida nabati di tingkat kelompok tani pengembang agens hayati dan pestisida nabati (dengan berbagai nama lokal seperti PPAH, POSIPAH dan Klinik PHT).

Dalam rangka meningkatkan mutu produk agens hayati yang dihasilkan LPHP/LAH dan layanan diagnosis OPT pada masyarakat/petani sekitarnya, pada tahun 2018 telah disertifikasi 11 LPHP yaitu LPHP Bandar Buat, Sumatera Barat; LPHP Gadingrejo, Lampung; LPHP Cianjur, Jawa Barat; LPHP Banyumas, Jawa Tengah; LPHP Madiun, Jawa Timur; LPHP Celuk, Bali; LPHP Narmada, NTB; LPHP Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan; LPHP Biromaru, Sulawesi Tengah; LPHP Kalasey, Sulawesi Utara; dan LPHP Gorontalo, Inisiasi sertifikasi ISO 9001:2008, telah dimulai tahun 2014 Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2 LPHP/LAH yaitu LPHP Pandak, Kabupaten Bantul Yogyakarta, dan LPHP Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya, tahun 2015 juga telah disertifikasi 3 LPHP/LAH yaitu LPHP Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, LAH Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, dan LAH Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016 juga telah disertifikasi LPHP Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan tahun 2017 dilaksanakan re-sertifikasi untuk penyesuaian ISO 9001: 2016 menjadi ISO 9001 : 2015.



Gambar 11. LPHP Narmada, Nusa Tenggara Barat yang telah disertifikasi ISO 9001 : 2015



Gambar 12. LPHP Bandar Buat, Sumatera Barat yang telah disertifikasi ISO 9001 : 2015

2. Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura

Untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk hortikultura, telah dilakukan upaya pengendalian OPT melalui gerakan pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah dengan pemanfaatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan sesuai prinsip PHT. Gerakan pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah ditargetkan sebanyak 1.754 hektar di 33 provinsi dan pusat, dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 sebanyak 1.744 ha atau 99,43. Tidak tercapainya sasaran Gerdal Cabai dan Bawang tersebut disebabkan karena adanya penurunan target karena *refocussing*. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura mampu menekan luas serangan OPT hortikultura, dengan proporsi luas serangan OPT terhadap luas tanam rata-rata mencapai 4,98% dari target yang ditetapkan maksimal 5%.

Saat ini untuk menekan serangan OPT, petani masih menggunakan pestisida kimia yang cukup tinggi pada lahan pertanaman khususnya tanaman

semusim. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi penggunaan pestisida kimia, perlu dilakukan bimbingan teknis pengendalian hayati/biologis secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Bimbingan teknis tersebut berupa pemanfaatan musuh alami (predator, parasitoid, dan patogen penyebab penyakit pada serangga hama). Dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang batas toleransi tanaman. Salah satu upaya dalam konservasi musuh alami yaitu dengan penanaman refugia. Selain itu juga digunakan tanaman jagung, tagetes, orok - orok, dan tanaman lainnya, yang berfungsi sebagai tanaman perangkap atau border.

Upaya penekanan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, merupakan langkah nyata dalam memenuhi tuntutan konsumen akan produk hortikultura bermutu dan aman konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah melalui peran serta instansi perlindungan tanaman berupaya untuk terus meningkatkan penyediaan agens hayati dan pestisida nabati di lapangan, melalui LPHP/LAH, PPAH dan Klinik PHT.

Salah satu upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura dalam perdagangan internasional yang mempersyaratkan SPS-WTO yang mengikat, dimana setiap negara anggotanya wajib memenuhi tuntutan yang dipersyaratkan oleh pasar internasional adalah tersedianya produk-produk hortikultura bermutu, yang diyakini tidak terinfeksi atau bebas dari kandungan OPT dan residu pestisida. Oleh karena itu, tahun 2018 telah dilaksanakan analisa residu pestisida pada produk hortikultura, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bahan aktif dari 12 (dua belas) sampel komoditas sayuran (cabai dan bawang merah) serta sebanyak 19 (sembilan belas) bahan aktif dari 10 sampel komoditas buah (strwaberry, jeruk, dan mangga). Secara umum, hasil uji analisa residu pestisida pada sayuran 74,07% tidak terdeteksi dan 25,93% terdeteksi dengan nilai BMR yang belum ditetapkan, sedangkan hasil uji analisa residu pada komoditas buah sebanyak 100% tidak terdeteksi.



Gambar 13. Gerakan Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Tahun 2018

3. Desa Pertanian Organik (DPO) Bidang Hortikultura

Tahun 2018 Kegiatan Desa Pertanian Organik bidang hortikultura merupakan tahun pertama pelaksanaan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura dengan target 250 desa. Pada tahun 2016 penyelenggarannya oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dan Direktorat Buah dan Florikultura, dengan jumlah desa yang sama. Sedangkan pada 2017, pelaksanaannya terhenti sementara, karena tidak ada alokasi anggaran. Pelaksanaan tahun 2018 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 2016, lokasi dan kelompok taninya. Namun demikian terjadi perubahan sebagai dampak, stagnannya alokasi anggaran pada tahun 2017, sehingga terjadi pergeseran lokasi, karena banyak kelompok tani kembali ke sistem pertanian konvensional.

Alokasi anggaran DPO pada Tahun 2018 untuk 250 Desa di 24 Provinsi sebesar Rp12.500.000.000,- dengan capaian realisasi Rp12.055.290.209,- (96,44%). Hal ini karena tidak terlaksananya kegiatan DPO di Provinsi Kepulauan Riau, yang disebabkan oleh keterbatasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil re-identifikasi calon petani dan calon lokasi

pelaksanaan Kegiatan Desa Pertanian Organik (DPO) tahun 2018, menunjukkan bahwa sejumlah 142 desa merupakan kelompok tani/desa baru, dan 108 desa merupakan desa lama sesuai dengan alokasi kegiatan pada tahun 2016. Daftar alokasi DPO Bidang Hortikultura disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Penyesuaian Lokasi DPO Bidang Hortikultura 2018

No	PROVINSI	RELOKASI		JUMLAH DPO 2018	ANGGARAN 2018
		2016 (lokasi awal)	2018 (lokasi penumbuhan baru)		
1	Aceh	-	3	3	150,000,000
2	Sumatera Barat	8	12	20	1,000,000,000
3	Jambi	-	2	2	100,000,000
4	Kepulauan Riau	2		2	100,000,000
5	Bengkulu	-	4	4	200,000,000
6	Bangka Belitung	-	4	4	200,000,000
7	Lampung	10	2	12	600,000,000
8	Banten	3	2	5	250,000,000
9	Jawa Barat	34	2	36	1,800,000,000
10	Jawa Tengah	-	37	37	1,850,000,000
11	DI Yogyakarta	1	13	14	700,000,000
12	Jawa Timur	33	7	40	2,000,000,000
13	Kalimantan Selatan	-	5	5	250,000,000
14	Kalimantan Barat	4	2	6	300,000,000
15	Kalimantan Timur	-	2	2	100,000,000
16	Kalimantan Tengah	-	5	5	250,000,000
17	Sulawesi Selatan	1	12	13	650,000,000
18	Sulawesi Tengah	-	2	2	100,000,000
19	Sulawesi Tenggara	3	2	5	250,000,000
20	Gorontalo	1	4	5	250,000,000
21	Sulawesi Utara	3	2	5	300,000,000
22	Bali	3	11	14	700,000,000
23	Nusa Tenggara Barat	-	6	6	300,000,000
24	Nusa Tenggara Timur	2	-	2	100,000,000
	Jumlah	108	142	250	12,500,000,000

Fasilitasi bantuan yang disalurkan bernilai Rp 50.000.000 per desa dengan komponen bantuan berupa bahan input yang sudah bersertifikat organik dan atau bahan input yang dihasilkan oleh LPHP/LAH/Klinik PHT dengan justifikasi penyedia bahwa bahan baku tidak mengandung unsur kimia. Pada lokasi yang tidak ditemukan benih/bibit bersertifikat organik, petani telah memberikan perlakuan dengan pencucian untuk menghilangkan kontaminan pada benih sesuai dengan bimbingan teknis yang dilakukan oleh petugas pendamping/fasilitator. Selain itu, komponen bantuan juga disediakan berupa

sarana atau peralatan sederhana untuk memproduksi bahan input organik. Realisasi bantuan yang telah dialokasikan sebanyak 248 Desa (99,22%), karena terdapat 2 (dua) desa yang tidak tereliasasi penyalurannya. Hal ini disebabkan keterbatasan manajemen SDM.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilakukan ke 250 Desa di 24 Provinsi lokasi DPO, yang dalam pelaksanaannya, sekaligus memberikan bimbingan teknis secara periodik oleh tenaga petugas pendamping/fasilitator. Selain itu petugas UPTD BPTPH dan LPHP juga melakukan pengawalan dan pemantauan, yang mengacu pada Standar Sistem Pertanian Organik, sampai kelompok tani siap didaftarkan untuk disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Namun demikian dari hasil laporan pelaksanaan, Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat merealisasikan komponen monitoring, evaluasi dan pelaporan karena keterbatasan SDM.



Gambar 14. Desa Pertanian Organik Bidang Hortikultura Tahun 2018

4. Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Pengembangan usaha tani pertanian salah satunya tergantung oleh faktor musim, tak terkecuali komoditas hortikultura, dimana manusia tidak dapat mengendalikan iklim dan cuaca sebagai sumber daya alam. Untuk itu,

langkah tepat dalam memanfaatkan sumber daya iklim serta mengurangi dampak ekstrim yang ditimbulkannya adalah dengan melakukan penyesuaian kegiatan pertanian terhadap perubahan musim pada masing-masing wilayah.

Salah satu dampak perubahan iklim yang sering terjadi adalah banjir dan kekeringan dimana penanganannya dilakukan dengan strategi pengelolaan hortikultura yang adaptif terhadap DPI, antara lain pemeliharaan lokasi di luar daerah DPI, memperbanyak pemupukan organik, penggunaan benih unggul yang toleran banjir/kekeringan, dan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi musim.

Tahun 2018, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan upaya antisipasi dan mitigasi untuk menekan kehilangan hasil hortikultura akibat DPI dan bencana alam melalui kegiatan penyusunan dan penyebaran buku informasi teknologi adaptasi dan mitigasi DPI serta data peta daerah rawan banjir dan kekeringan.

5. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura, antara lain; 1) Informasi dan analisa data OPT dan DPI belum memadai; 2) Serangan OPT yang belum tertangani secara optimal, 3) Jumlah PHP-POPT perlindungan tanaman sangat terbatas, 4) Sarana dan prasarana LPHP/LAH dan fasilitas klinik PHT tidak memadai, 5) Keterbatasan kegiatan penyiapan *draft pest list*.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, tahun 2019 Direktorat Perlindungan Hortikultura melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura akan melakukan kegiatan, antara lain : 1) Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT dan DPI, 2) Meningkatkan koordinasi dan kapabilitas petugas perlindungan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan OPT hortikultura; 3) Memberdayakan petugas lapang (PHP-POPT) yang tersedia dalam melakukan pengamatan dan pelaporan keadaan serangan OPT dan DPI; 4) Melakukan penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai; 5) Meningkatkan kegiatan penyiapan *draft pest list* yang memadai.

3.2.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Sasaran program Nomor 5 memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011).

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

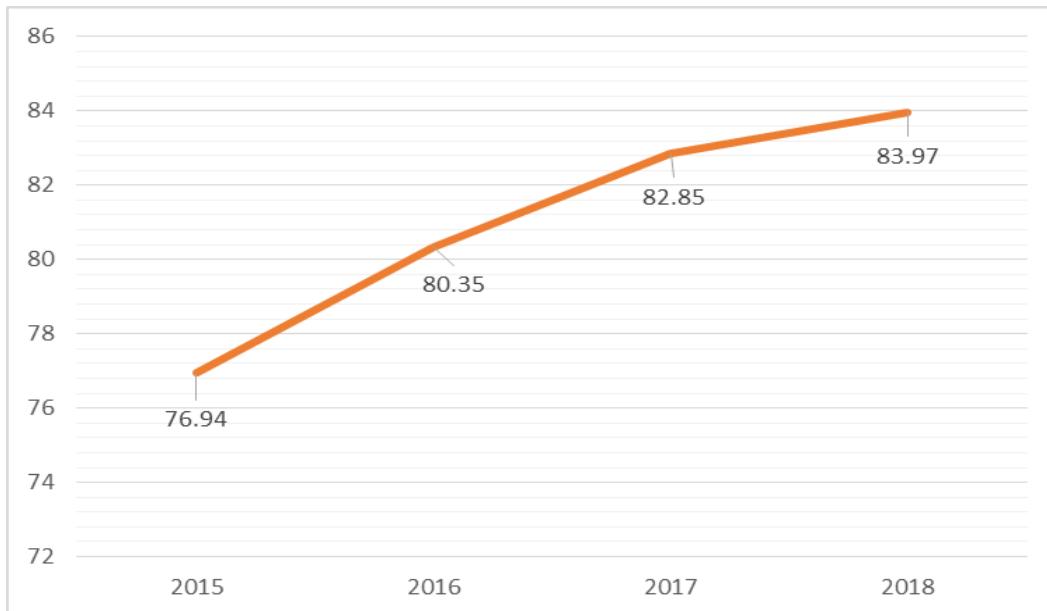
Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu unit kerja; 2) Menilai akuntabilitas kinerja pada unit kerja; 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas; dan 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periods sebelumnya.

Sasaran Evaluasi yang diharapkan adalah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang berisi rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan minimal unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang menggambarkan kinerja utama.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 adalah 83,97 (Memuaskan). Pencapaian nilai ini termasuk kategori sangat berhasil. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap 5 (lima)

komponen besar manajemen kinerja meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik seperti pada Gambar 15 .



Gambar 15. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2018

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura selama empat tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan yaitu 76,94 di tahun 2015; 80,35 di tahun 2016; 82,85 pada tahun 2017; dan 83,97 dengan Kategori A (Memuaskan). Rata-Rata peningkatan nilai SAKIP 4 tahun terakhir adalah sebesar 2,97 %. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun.

Nilai Kinerja (NK) merupakan indikator kedua yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada Penyusunan PK, Nilai Kinerja (NK) ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011. Namun demikian dalam perjalannya terdapat peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur penilaian kinerja yaitu PMK Nomor 214 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.

Pada PMK Nomor 214 tahun 2017, terdapat 3 level penilaian kinerja yaitu Nilai Kinerja pada level Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja pada level Eselon I atau Program, dan Nilai Kinerja pada level Satuan Kerja (Satker). Capaian Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 mencapai 79,44 atau mencapai 107,72 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 73,75 atau dikategorikan sangat berhasil.

Nilai Kinerja pada level Satker yang ditampilkan pada aplikasi SMART merupakan capaian Nilai Kinerja pada aspek implementasi yang ditentukan oleh empat parameter dengan bobot yang berbeda-beda yaitu : 1) capaian keluaran/output dan kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.

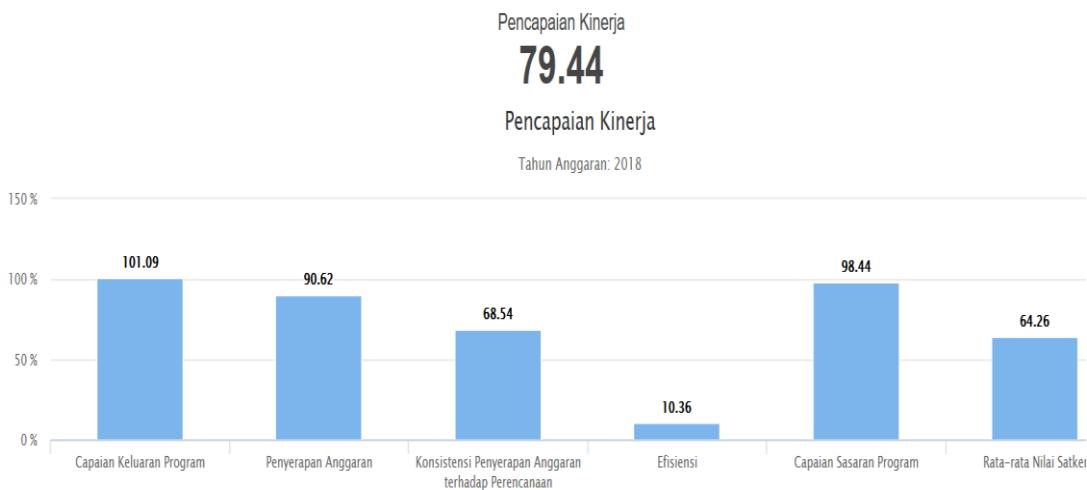
Sedangkan pada Nilai Kinerja level Eselon I/Program merupakan capaian Nilai Kinerja yang ditentukan oleh :

- a. Nilai Kinerja aspek implementasi (NKI) dengan bobot 33,3% terdiri atas : 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.
- b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP) dengan bobot 66,7%.
- c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Eselon I

Rumus penghitungan Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program adalah sebagai berikut :

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata-rata nilai satker}}{2}$$

Nilai Kinerja Program Direktorat Jenderal Hortikultura pada aplikasi SMART sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 adalah sebesar 79,44 % sehingga dapat termasuk kategori penilaian “cukup” berdasarkan penilaian PMK Nomor 214 Tahun 2017, dengan rincian seperti ditampilkan pada Gambar 16.



Gambar 16. Capaian Nilai Kinerja Tahun 2018

Variabel penilaian yang memiliki nilai paling rendah adalah rata - rata Nilai Kinerja Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu 64,26. Rendahnya rata-rata Nilai Kinerja Satker disebabkan antara lain karena :

1. Tidak tertibnya petugas pelaporan Satker dalam melaporkan capaian keluaran bulanan (realisasi volume keluaran) dan capaian output kegiatan per semester. Masih banyak Satker yang belum menginput laporan realisasi volume output dan realisasi indikator output kegiatan.
2. Masih banyak daerah yang tidak konsisten antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana.
3. Beberapa Satker daerah memiliki realisasi serapan anggaran yang rendah karena permasalahan teknis dan administrasi.
4. Terdapat beberapa indikator sasaran program yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan absensi pelaporan SPH yang belum optimal.

Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala,
2. Melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker - satker mandiri,

3. Perlu dilakukan identifikasi potensi masalah yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan satker dalam pelaksanaan kegiatan
4. Petugas data melakukan validasi ke daerah yang absensi pelaporan datanya rendah.

3.2.2. Capaian kinerja lain

3.2.2.1. Predikat WBK Direktorat Jenderal Hortikultura

Untuk menanamkan jiwa pengabdian dan anti korupsi, serta dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Kementerian Pertanian perlu pemberian predikat kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan laporan hasil penilaian wilayah bebas dari korupsi pada unit kerja lingkup kementerian pertanian tahun 2018, perlu memberikan penghargaan kepada unit kerja lingkup kementerian pertanian yang telah melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi melalui program wilayah benas dari korupsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 841/Kpts/PW.410/12/2018 maka dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi.



Gambar 17. Penyerahan Penghargaan WBK Tahun 2018

3.2.3. Realisasi Keuangan

Analisis pencapaian kinerja keuangan dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK sebesar Rp1.242.629.794.000,-. Realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 22 Januari 2019 menurut jenis kewenangan adalah sebesar Rp1.126.010.972.000,- atau 90,62 %, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Kewenangan Instansi

No	Kegiatan	Pagu (Rp 000)	Realisasi*)	
			(Rp,000)	(%)
1	Pusat	113.956.703	105.408.170	92,50
2	Daerah	1.128.673.091	1.020.602.801	90,43
	Dekonsentrasi	120.438.200	115.085.854	95,56
	Tugas Pembantuan	1.008.234.891	905.516.947	89,81
TOTAL		1.242.629.794	1.126.010.972	90,62

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 22 Januari 2019.
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Adapun realisasi Tahun 2018 berdasarkan jenis belanja dan kegiatan utama dan dapat dilihat pada Tabel 13 dan 14 berikut:

Tabel 13. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Berdasarkan Jenis Belanja TA 2018

Jenis Belanja	Pagu (Rp,000)	Realisasi (Rp,000)	%
Belanja Pegawai	24.459.908	23.146.385	94,63
Belanja Barang	1.213.826.726	1.100.463.601	90,66
Belanja Modal	4.343.160	2.400.986	55,28
Total	1.242.629.794	1.126.010.972	90,62

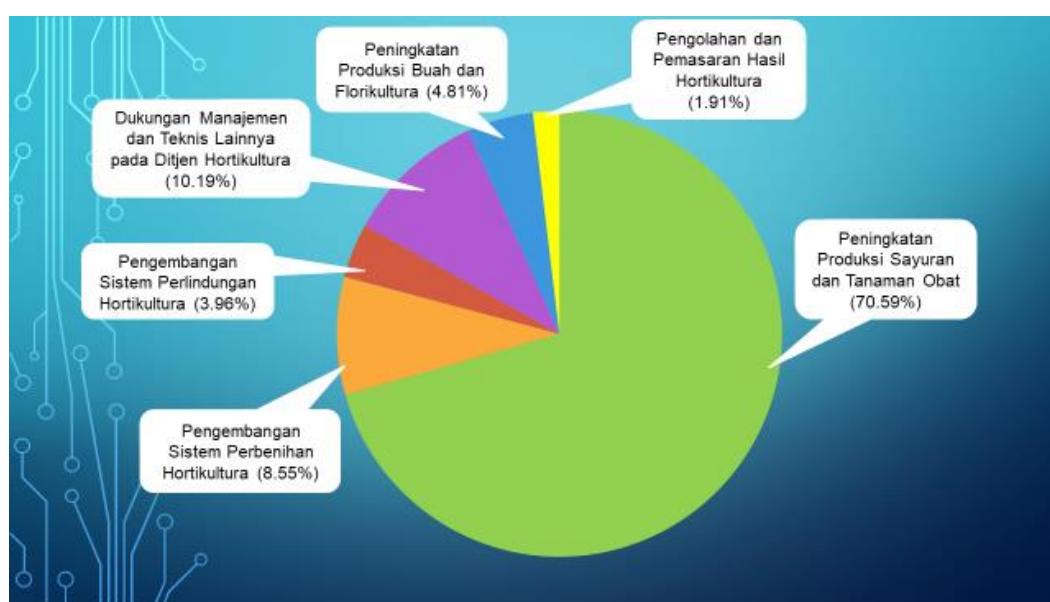
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 22 Januari 2019.
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Tabel 14. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Kegiatan Utama

No	Kegiatan	Pagu (Rp 000)	Realisasi*)	
			(Rp,000)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	877.124.169	803.595.344	91,62
2	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	106.186.109	89.085.826	83,90
3	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	49.244.685	47.832.398	97,13
4	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	126.583.605	118.220.059	93,39
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	59.787.732	45.307.736	75,78
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	23.703.494	21.969.609	92,69
TOTAL		1.242.629.794	1.126.010.972	90,62

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 22 Januari 2019
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018, dapat dilihat pada Gambar 18 terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yaitu sebanyak 70,59%, sedangkan porsi terkecil yaitu 1,91% dialokasikan untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.



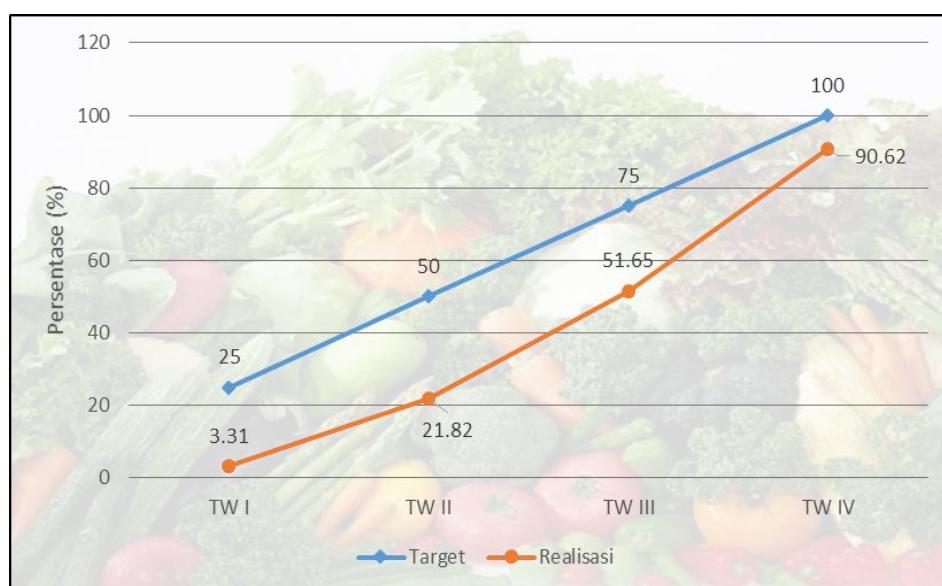
Gambar 18. Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menurut Kegiatan Utama Tahun 2018

Adapun penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per triwulan disajikan pada Tabel 15, Gambar 17 dan Lampiran 9.

Tabel 15. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 per Triwulanan

Triwulan	Pagu (Rp,000)	Realisasi		Target	
		(Rp,000)	%	(Rp,000)	%
TW I	1.355.960.980	44.882.308	3,31	338.990.245	25
TW II	1.355.960.980	295.870.686	21,82	677.980.490	50
TW III	1.255.960.980	648.703.846	51,65	941.970.735	75
TW IV	1.242.629.794	1.126.010.972	90,62	1.242.629.794	100

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 22 Januari 2019
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>)



Gambar 19. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 per-triulanan.

Dari Gambar 19 diatas menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan anggaran mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan target yang disebabkan oleh:

1. Adanya refocusing anggaran pada bulan Juli 2018, dimana satker – satker daerah berhati – hati dalam melaksanakan kegiatan karena ada kekhawatiran terjadinya pagu minus.

2. Setelah revisi keluar, muncul kegiatan #Bekerja dan diperlukan persiapan administrasi seperti penyusunan petunjuk teknis, verifikasi penerima bantuan dan administrasi pengadaan di daerah
3. Beberapa komoditas memiliki jadwal tanam dan ketersediaan benih diakhir tahun.
4. Beberapa wilayah yang terkena bencana seperti Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat baru bisa melaksanakan kegiatan di akhir tahun.
5. Kawasan aneka cabai, khusus untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung, pengembangan kawasan cabai besar seluas 50 ha yang dialokasikan ke Kab. Belitung 20 ha, Kab. Bangka 10 ha dan Kab. Bangka Tengah 20 ha, tidak dilaksanakan karena terjadi gagal lelang dan sudah kehabisan waktu untuk melelang kembali.
6. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih terkendala ketersediaan benih dan tingginya harga benih, sehingga di beberapa satker dilakukan lelang ulang. Lewatnya musim tanam menyebabkan beberapa daerah mengembalikan anggarannya.
7. Output benih buah lainnya, beberapa kabupaten tidak melaksanakan kegiatan fasilitasi benih buah lainnya. Di Kab. Kebumen untuk komoditas durian 5.000 batang dan lengkeng 6.000 batang tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktunya untuk lelang. Sedangkan fasilitasi benih lainnya di Kab. Jeneponto untuk komoditas durian sebanyak 2.000 batang tidak direalisasikan dikarenakan komoditas dan varietas yang akan dikembangkan dianggap tidak sesuai dengan agroklimat dari daerah tersebut. Untuk kegiatan benih buah lainnya di NTB, yang ditargetkan sebesar 72.000 batang, terealisasi 55.000 batang atau sebesar 76,39% dikarenakan adanya kendala berupa bencana alam (gempa bumi) di lokasi CPCL.
8. Output benih bawang merah, pembanyakannya benih bawang merah yang dilaksanakan di kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di beberapa provinsi tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta akibat koordinasi internal di Satker daerah yang terlambat dalam proses penyediaan dokumen seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Masih rendahnya penguasaan teknologi dan kompetensi SDM pembanyakannya benih bawang merah serta kurang tersedianya fasilitas penyimpanan benih bawang merah di daerah penerima seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah. Di beberapa provinsi, contoh provinsi Sumatera Utara, kegiatan produksi benih bawang

- merah terkendala cuaca. Adanya bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan liquifaksi seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah juga menyebabkan kendala dalam pencapaian target output benih benih bawang merah ini.
9. Beberapa satker provinsi yang realiasi target output benih bawang putihnya rendah: Provinsi Jateng, Sulsel & Kab. Solok. Beberapa hal menjadi penyebab tidak tercapainya output kegiatan benih bawang putih ini yaitu :
 - a. masih minimnya ketersediaan benih sumber bawang putih bermutu,
 - b. adanya miss koordinasi antara satker dan pelaksanaan daerah yang menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan seperti terjadi di Kabupaten Magelang,
 - c. minimnya kelompok tani yang bersedia menanam bawang putih dan bersedia menjadi penangkar benih bawang putih untuk ke depan seperti di Satker Kabupaten Solok, serta
 - d. adanya ketakutan satker dan pelaksana di daerah akibat munculnya banyak peristiwa dan kasus hukum terkait penyiapan benih bawang putih seperti terjadi Kab. Lombok Timur.
 10. Output sarana prasarana benih hortikultura, di beberapa provinsi tidak melaksanakan lelang, karena waktu lelang yang tidak mencukupi waktunya. Di Satker Provinsi Jawa tengah, sejumlah sarana dan prasarana diantaranya berupa *screen house* yang direncanakan di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tidak terealisasi karena adanya ketakutan dan koordinasi internal yang kurang optimal.
 11. Kegiatan pengembangan kawasan mangga di Kab. Cirebon & Indramayu tidak dapat dilaksanakan 100%, dimana kedua kegiatan tersebut masuk dalam program #Bekerja. Kendala di Kab. Cirebon adalah adanya keterbatasan lahan dan keterbatasan warga rumah tangga miskin (RTM) di salah satu desa untuk mengembangkan mangga program #Bekerja sehingga untuk pengembangan kawasan mangga hanya dapat terpenuhi seluas 50 ha. Sedangkan kendala di Kab. Indramayu adalah tidak tersedianya lahan di lokasi RTM yang sudah ditentukan sehingga tidak dapat terlaksana.
 12. Kawasan manggis, kabupaten yang tidak dapat merealisasikan seluruh luas area kawasan adalah Kab. Garut, dimana hanya terealisasi sebanyak 340 ha dari target 497 ha (68,41%). Pengembangan manggis di Kabupaten Garut merupakan program #Bekerja. Kendala yang dialami adalah kondisi lokasi

RTM, dimana tidak semua lokasi RTM sesuai untuk pengembangan manggis karena ketinggiannya lebih dari 1.000 meter dpl, dan hanya terdapat 340 ha yang sesuai untuk pengembangan manggis.

13. Pengembangan kawasan pisang mendukung #Bekerja tidak terealisasi di Kab. Bone, Brebes dan Banyumas. Hal tersebut disebabkan oleh gagalnya pengadaan kegiatan #Bekerja khususnya untuk pengadaan benih pisang bersertifikat. Beberapa kondisi seperti waktu pengadaan untuk benih pisang bersertifikat yang terlalu singkat serta tidak adanya pihak ketiga yang mengikuti lelang menyebabkan terjadinya gagal lelang.
14. Kawasan salak 25 ha di Kab. Magelang tidak dapat terealisasi karena tidak tersedianya benih salak bersertifikat. Pengadaan benih tidak dapat dilakukan karena penangkar yang ada belum terdaftar di BPSB.
15. Kawasan Duku 100 ha mendukung Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) hanya difokuskan di Kab. Ogan Komering Ilir yang merupakan kawasan sentra duku dengan penerima bantuannya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Namun kegiatan ini tidak terlaksana, karena tidak tersedianya benih bersertifikat. Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah berusaha mencari benih duku berkualitas, namun BPSB tidak dapat menjamin bahwa benih tersebut terbebas dari penyakit sehingga tidak memberikan jaminan sertifikat.
16. Beberapa daerah yang tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. Provinsi DIY tidak dapat merealisasikan targetnya, dari target sebanyak 6 unit, terealisasi 5 unit. Hal ini, karena ada 1 (satu) kelompok tani yang mengundurkan diri dan tidak siap melaksanakan sertifikasi, menjelang dilaksanakannya sertifikasi. Kelompok tani yang tidak siap disertifikasi organik tersebut adalah Kelompok Tani Kumpul Makmur, Jamblangan, Purwobinangun, Pakem, Sleman.
 - b. Provinsi Aceh tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar mutu dan pemasaran hortikultura yang ditargetkan sebanyak 3 unit. Hal ini karena pada saat mengajukan revisi anggaran, ada perubahan peraturan terbaru, sehingga tidak dapat direvisi. Mutasi jabatan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga menjadi alasan keterlambatan melaksanakan revisi anggaran.

- c. Provinsi Kalsel tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar mutu dan pemasaran hortikultura 4 unit dengan alasan pada saat akan dilaksanakan, kondisi di lapangan sudah terlewat masa panen.
- d. Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura di Provinsi Sulut dengan target output sebanyak 5 unit juga tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena keterlambatan melaksanakan kegiatan, sehingga tidak sempat melaksanakan proses sertifikasi, meski sudah melakukan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu).
- e. Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah dengan target output sebanyak 6 unit juga tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena sulit untuk mendapatkan calon petani/calon lokasi (CP/CL) kelompok tani yang siap untuk disertifikasi organik.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- 1. Penugasan eselon II, III, dan IV untuk monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura yang didanai APBN sesuai dengan SK Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/0T.050/2/2018 tentang Tim Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura;
- 2. Melakukan workshop percepatan Kegiatan TA 2018 di 9 provinsi yang memiliki anggaran terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan dan Bali;
- 3. Mengirim surat kepada seluruh satker agar segera melakukan percepatan anggaran dan memberikan arahan kepada KPA melakukan upaya percepatan realisasi dan memberikan peringatan kepada satker yang belum ada perubahan signifikan akan dipertimbangkan untuk dilakukan realokasi anggaran ke satker lain;
- 4. Kepada seluruh pelaksana kegiatan agar dapat melakukan pendekatan dengan pihak ULP di masing-masing daerah dalam rangka mempercepat proses pengadaan;
- 5. Agar Gubernur/Bupati/Walikota segera menerbitkan SK Pejabat Pengelola Satker pada saat terjadi mutasi jabatan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura kedepan, berikut adalah beberapa hal yang harus menjadi penekanan tindak lanjut ke depan atas permasalahan penyerapan anggaran ini :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara optimal. Sesuai PP 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Diharapkan kegiatan di Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan SPI;
2. Efisiensi dan harmonisasi cara kerja kesatkeran dan membuat skala prioritas kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan dukungan penganggaran yang memadai. Selain itu juga berusaha terus melakukan perbaikan pengelolaan manajemen kesatkeran utamanya pola koordinasi dan optimalisasi SDM pengelola kegiatan.
3. Mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target-target serapan triwulan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan;
4. Untuk pelaksanaan tahun 2019, identifikasi CP/CL dilakukan sebelumnya pada akhir tahun 2018, sehingga jadwal tanam dapat dilaksanakan di musim hujan pada bulan Januari-Maret. Hal ini untuk menghindari keterlambatan jadwal tanam seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu menunggu tanam di bulan November-Desember;
5. Pengadaan barang dan jasa yang bersifat lelang agar melakukan persiapan lelang di akhir tahun 2018, sehingga pada awal tahun 2019 sudah dapat ditetapkan pemenang lelang dan barang dapat didistribusikan kepada kelompok tani yang akan melakukan tanam di bulan Januari-Maret 2019;
6. Pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugas tidak terhambat.

Rencana aksi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 10. Pada matrik tersebut berisi upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Tahun 2018 dan permasalahan yang dihadapi terutama untuk kinerja yang tidak tercapai 100% beserta tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun mendatang.

3.2.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Lampiran Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i (diukur dengan menghitung rata - rata ukur secara geometrik)

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dalam hal efisiensi sebesar 10,36%, Efisiensi ini dihitung dan dilihat pada aplikasi SMART DJA, Efisiensi ini tidak memiliki skala 0% - 100%, untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \{(E/20) \times 50\}$$

dimana NE = Nilai efisiensi dan E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2019 nilai efisiensi nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{NE} &= 50\% + \{(10,36\%/20) \times 50\} \\ &= 0,5 + \{0,00518 \times 50\} \\ &= 0,5 + 0,259 \\ &= 0,759 \text{ atau } 75,9 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 adalah 75,9 %.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di sub sektor Hortikultura pada Tahun 2018. Upaya keras telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018, dari 8 (delapan) indikator kinerja menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura, penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura, produksi cabai, rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura), nilai kerja dan rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja lainnya dengan kategori berhasil yaitu produksi bawang merah. Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, penilaian ini akan dilakukan sekitar bulan Maret 2019.

Secara umum keberhasilan pencapaian produksi hortikultura disebabkan oleh adanya dukungan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu; (1) Pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP terutama untuk komoditas potensi ekspor; (2) Mendorong percepatan registrasi kebun dalam memenuhi persyaratan ekspor; (3) Mendorong kemitraan usaha antara kelembagaan tani dengan perusahaan eksportir dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu ekspor; (4) Bimbingan teknis pengendalian OPT; (5) Pengaturan pola tanam cabai dan bawang merah; (6) Pengembangan kawasan di luar pulau Jawa yang memiliki potensi lahan yang baik; serta (7) Penguatan peran champion.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan hortikultura masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu : (1) untuk produksi bawang merah menghadapi masalah harga bawang merah yang sempat jatuh dan stabil rendah sehingga menurunkan minat petani untuk menanam bawang merah, kondisi kering/musim kemarau yang cukup panjang berpengaruh signifikan terhadap produksi dan produktivitas terutama di wilayah sentra dan di beberapa wilayah, terjadi peralihan tanam dari bawang merah menjadi komoditas lainnya; (2) dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura, antara lain; informasi dan analisa data OPT dan DPI belum memadai, serangan OPT yang belum tertangani secara optimal, jumlah PHP-POPT perlindungan tanaman sangat terbatas, sarana dan prasarana LPHP/LAH dan fasilitas klinik PHT tidak memadai, dan keterbatasan kegiatan penyiapan *draft pest list*.

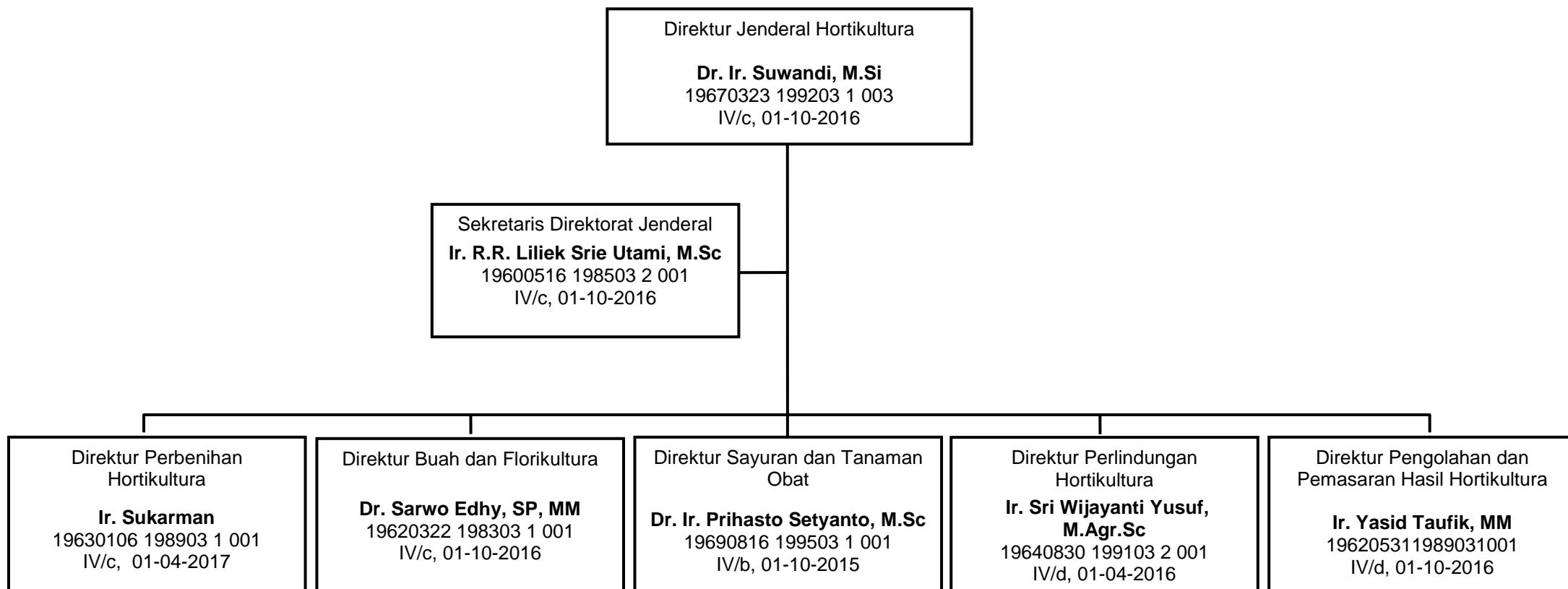
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan hortikultura ke depan, seperti: (1) menjaga pola tanam sehingga panen lebih terukur untuk menghindari adanya over produksi yang menyebabkan harga jatuh di tingkat petani, memperkuat peran champion untuk menjaga manajemen tanam di lapangan, menerapkan *ceiling* dan *floor price* untuk menjaga harga di tingkat petani sampai konsumen, menyediakan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan (jika harga rendah), gudang berpendingin untuk memperpanjang umur simpan bawang merah sebagai *buffer stock* pemerintah, alat dan mesin pengolahan bawang merah, (2) menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT dan DPI, meningkatkan koordinasi dan kapabilitas petugas perlindungan, memberdayakan petugas lapang (PHP-POPT), melakukan penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura dan meningkatkan kegiatan penyiapan *draft pest list* yang memadai.

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah direncanakan. Tidak lupa keberhasilan pembangunan hortikultura banyak ditentukan pula oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah diluar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. Oleh

karenanya kerjasama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

LAMPIRAN

**PEJABAT STRUKTURAL
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**



Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

KOMPOSISI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018

NO	GOL/RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	IV/d	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2
3	IV/c	2	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	4
4	IV/b	1	11	2	-	-	0	-	-	-	-	-	14
5	IV/a	2	22	6	-	-	0	-	-	-	-	-	30
6	III/d	1	29	46	-	-	0	-	-	1	-	-	77
7	III/c	-	9	51	-	-	1	-	-	-	-	-	61
8	III/b	-	3	38	-	-	2	-	-	24	-	-	67
9	III/a	-	-	26	-	-	1	-	-	18	-	-	45
10	II/d	-	-	-	-	-	1	-	-	18	-	-	19
11	II/c	-	-	-	-	-	3	-	-	12	3	-	18
12	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	7
13	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
14	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
15	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		6	77	170	0	0	8	0	0	78	7	7	353

Lampiran 3. Sasaran Kerja Pegawai Eselon I dan II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

NO.	I. PEJABAT PENILAI	NO.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama Dr. Ir. Suwandi, M.Si	1	Nama Ir. R.R. Liliek Srie Utami, M.Sc			
2	NIP 196703231992031003	2	NIP 196005161985032001			
3	Pangkat/Gol.Ruang/TMT Pembina Utama Muda / IV/c / 1 Oktober 2016	3	Pangkat/Gol.Ruang/TMT Pembina Utama Muda / IV/c / 1 Oktober 2016			
4	Jabatan Direktur Jenderal Hortikultura	4	Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura			
5	Unit Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura	5	Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura			
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Menyelenggarakan penataan dokumen perencanaan	-	1 dokumen	100	9 bln	7.684.644.000
2	Menyelenggarakan penataan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian	-	3 dokumen	100	9 bln	5.350.000.000
3	Melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura	-	1 dokumen	100	9 bln	5.753.945.000
4	Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perkantoran Ditjen Hortikultura	-	12 dokumen	100	9 bln	41.317.793.000
5	Menyelenggarakan layanan internal	-	12 dokumen	100	9 bln	4.343.160.000
6	Menyusun laporan evaluasi dan layanan rekomendasi	-	3 dokumen	100	9 bln	14.077.235.000
7	Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	-	1 dokumen	100	9 bln	-
8	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	-	1 dokumen	100	9 bln	-

Pejabat Penilai,

Dr. Ir. Suwandi, M.Si

NIP. 196703231992031003

Jakarta,
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ir. R.R. Liliek Srie Utami, M.Sc

NIP. 196005161985032001

SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

NO. I. PEJABAT PENILAI			NO. II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
1 Nama	Dr. Ir. Suwandi, Msi		1 Nama	DR. IR PRIHASTO SETYANTO, M.SC					
2 NIP	19670323 199203 1 003		2 NIP	19690816 199503 1 001					
3 Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda /IV/c/1 Oktober 2016		3 Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda (IV/c) /1 Oktober 2018					
4 Jabatan	Direktur Jenderal Hortikultura		4 Jabatan	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat					
5 Unit Kerja	Direktorat Jenderal Hortikultura		5 Unit Kerja	Direktorat Jenderal Hortikultura					
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN			AK	TARGET				
					KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)	
1	Menetapkan dan menyelenggarakan pengembangan kawasan aneka cabai			-	13,055	ha	100	12 Bulan	388,219,592,000
2	Menetapkan dan menyelenggarakan pengembangan kawasan bawang merah			-	5,493	ha	100	12 Bulan	219,725,273,000
3	Menyelenggarakan pengembangan kawasan sayuran lainnya :								
	a. Kawasan Bawang Putih			-	5,949	ha	100	12 Bulan	236,784,687,000
	b. kegiatan Bekerja			-	1,764	ha	100	8 Bulan	22,000,000,000
4	Menyelenggarakan peningkatan produksi tanaman obat			-	25	ha	100	12 Bulan	-
5	Menyelenggarakan peningkatan produksi Sayuran daun dan jamur			-	10	kab	100	12 Bulan	-
6	Pembinaan pengembangan sayuran dan tanaman obat				282	kab	100	12 Bulan	9,850,307,000

Pejabat Penilai,

Dr. Ir. Suwandi, Msi

NIP. 19670323 199203 1 003

Jakarta, 16 Januari 2018

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

DR. IR PRIHASTO SETYANTO, M.SC

NIP. 19690816 199503 1 001

SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

NO. I. PEJABAT PENILAI			NO. II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
NO.	I. PEJABAT PENILAI	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
NO.	I. PEJABAT PENILAI	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Nama	Dr.Ir Suwandi,M.Si	1	Nama	Dr.Sarwo Edhy,SP,MM				
2	NIP	19670323 199203 1 031	2	NIP	19620322 198303 1 001				
3	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda, IV/c, 1 Oktober 2016	3	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda, IV/c, 1 Oktober 2016				
4	Jabatan	Direktur Jenderal Hortikultura	4	Jabatan	Direktur Buah dan Florikultura				
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Hortikultura	5	Unit Kerja	Direktorat Buah dan Florikultura				
TARGET									
1	Menetapkan rumusan kebijakan serta melaksanakan supervisi dibidang peningkatan produksi tanaman jeruk,perdu dan pohon,tanaman terna dan tanaman merambat serta tanaman florikultura	-	1	kegiatan	100	10	bln	1.329.253.000	
2	Melaksanakan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang peningkatan tanaman jeruk,perdu dan pohon.tanaman terna dan tanaman merambat serta tanaman florikultura	-	5	dokumen	100	8	bln	552.274.000	
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan produksi tanaman jeruk,perdu dan pohon,tanaman terna dan tanaman merambat,serta tanaman florikultura	-	1	kegiatan	100	10	bln	394.634.000	
4	Melaksanakan pengembangan kawasan jeruk	-	1.870	ha	100	10	bln	16.346.893.000	
5	Melaksanakan pengembangan kawasan buah lainnya	-	350	ha	100	10	bln	4.431.770.000	
6	Melaksanakan pengembangan kawasan florikultura	-	22.100	M2	100	10	bln	2.200.000.000	
7	Melaksanakan pengembangan kawasan mangga	-	2095	ha	100	10	bln	14.250.200.000	
8	Melaksanakan pengembangan kawasan manggis	-	1.165	ha	100	10	bln	10.972.638.000	
9	Melaksanakan pengembangan kawasan pisang	-	416	ha	100	10	bln	9.220.675.000	
		-							

Pejabat Penilai,



Dr.Ir Suwandi,M.Si

NIP. 19670323 199203 1 031

Jakarta, 5 Januari 2018

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai



Dr.Sarwo Edhy,SP,MM

NIP. 19620322 198303 1 001

**SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

NO. I. PEJABAT PENILAI		NO. II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1 Nama	Dr. Ir. Suwandi, M.Si	1 Nama	Ir. Sri Wijayanti Yusuf, M.Agr.Sc				
2 NIP	196703231992031003	2 NIP	196408301991032001				
3 Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda / IV c / 1 Oktober 2016	3 Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Madya / IV D / 01 April 2016				
4 Jabatan	Direktur Jenderal Hortikultura	4 Jabatan	Direktur Perlindungan Hortikultura				
5 Unit Kerja	Direktur Jenderal Hortikultura	5 Unit Kerja	Direktur Perlindungan Hortikultura				
NO. III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET				
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)	
1	Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura (Pusat dan daerah): 1) TOR/KAK; 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3) Rencana Operasional Kegiatan	-	12	Dok	100	12 bln	217,709,000
2	Menyetujui kebijakan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura (Pusat dan Daerah: Pedum, RKT)	-	6	Draft	100	2 bln	73,200,000
3	Menyetujui Pedoman Pengelolaan OPT Hortikultura	-	7	Judul	100	12 bln	308,409,000
4	Melaksanakan identifikasi OPT Hortikultura	-	2	Laporan	100	2 bln	9,500,000
5	Bimbingan Teknis adaptasi/mitigasi DPI dan Bencana alam pada hortikultura		9	Laporan	100	12 bln	119,239,000
6	Menyetujui persediaan sarana prasarana pengendalian OPT hortikultura		58	ha	100	12 bln	480,231,000
7	Menyetujui pelaksanaan workshop persiapan sertifikasi LPHP /LAH	-	1	kegiatan	100	1 bln	183,580,000
8	Melaksanakan surveillance OPT untuk draft pestlist komoditas hortikultura	-	4	draft pestlist	100	10 bln	501,204,000
9	Melaksanakan pemantauan produk hortikultura terhadap residu pestisida	-	17	Laporan	100	8 bln	31,500,000
10	Melaksanakan koordinasi penerapan teknologi pengendalian OPT hortikultura	-	52	Laporan	100	12 bln	546,059,000
11	Melaksanakan pembinaan /pendampingan/ bimbingan teknis pemasarkan teknologi pengendalian dibidang perlindungan hortikultura	-	112	Laporan	100	12 bln	671,058,500
12	Temu Teknis penerapan teknologi adaptasi/mitigasi DPBA pada bawang merah		1	Kegiatan	100	1 bln	146,636,000
13	Menyetujui pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan OPT	-	20	Laporan	100	12 bln	102,698,000
14	Melaksanakan Monitoring Penerapan PHT di kawasan cabai, bawang merah dan hortikultura lainnya dan kelembagaan		71	Laporan	100	12 bln	327,623,000

15	Melaksanakan Pembinaan desa pertanian organik	-	1	Kegiatan	100	1 bln	146,098,000
16	Menyetujui persediaan sarana antisipasi penanggulangan DPI /BA dan pengiriman	-	7	ha	100	12 bln	60,000,000
17	Menyetujui monitoring penanganan DPI dan BA pada hortikultura	-	9	Laporan	100	12 bln	55,406,000
18	Menyetujui laporan data dan informasi OPT Hortikultura, data kelembagaan, laporan bulanan dan tahunan Direktorat Perlindungan Hortikultura	-	46	Laporan	100	12 bln	77,220,000
19	Menyetujui koordinasi pelaksanaan Sistem Perlindungan Hortikultura	-	1	Kegiatan	100	1 bln	190,402,000
20	Menyetujui koordinasi terkait program pengembangan sistem perlindungan hortikultura	-	58	Laporan	100	12 bln	59,927,500
21	Menyetujui pelaksanaan workshop gerakan pengendalian OPT buah dan florikultura	-	2	kegiatan	100	4 bln	257,604,000
22	Menyetujui Sosialisasi Pengendalian OPT Bawang merah dan sayuran lainnya		2	Laporan	100	2 bln	166,600,000
23	Menyetujui Peramalan OPT Hortikultura		1	kegiatan	100	12 bln	174,571,000
24	Menyetujui konsolidasi tahunan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura		1	kegiatan	100	1 bln	181,276,000
25	Menyetujui Bimtek Teknologi adaptasi/mitigasi DPPIBA		30	Laporan	100	12 bln	198,281,000
26	Menyetujui pendampingan Upsus cabai dan komoditas strategis		12	Laporan	100	12 bln	121,153,000

Pejabat Penilai,

Dr. Ir. Suwandi, M.Si
NIP. 196703231992031003

Jakarta, 6 Maret 2018
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ir. Sri Wijayanti Yusuf, M.Agr.Sc
NIP. 196408301991032001

SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NO.	I. PEJABAT PENILAI		NO.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
NO.			NO.				
1	Nama	Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM	1	Nama	Ir. Sukarman		
2	NIP	19580206 198503 1 001	2	NIP	19630106 198903 1 001		
3	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama/IV-e/01 Oktober 2015	3	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda/IV-c/01 April 2017		
4	Jabatan	Direktur Jenderal Hortikultura	4	Jabatan	Direktur Perbenihan Hortikultura		
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Hortikultura	5	Unit Kerja	Direktorat Perbenihan Hortikultura		
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Menetapkan kegiatan perbenihan pusat dan daerah serta target produksi benih hortikultura		-	1 dokumen	100	4 bln	318.700.000
2	Membina kegiatan teknologi produksi dan kelembagaan perbenihan hortikultura		-	1 dokumen	100	12 bln	10.734.181.000
3	Membina sertifikasi dan pengawasan mutu benih Hortikultura		-	1 dokumen	100	12 bln	1.014.400.000
4	Membina kegiatan pendaftaran dan penyebaran varietas hortikultura		-	1 dokumen	100	12 bln	1.630.300.000
5	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Subdit Produksi dan Kelembagaan, Subdit Pengawasan Mutu Benih, dan Subdit Pengembangan Varieras		-	1 dokumen	100	12 bln	18.543.700.000
6	Mengevaluasi kegiatan perbenihan hortikultura		-	1 kegiatan	100	1 bln	342.000.000
7	Pengawalan dan Pembinaan UPSUS PAJALE		-	12 kegiatan	100	12 bln	-
8	Pengawalan dan Pembinaan UPSUS Komoditas Hortikultura		-	12 kegiatan	100	12 bln	-
Total		-					32.583.281.000

Pejabat Penilai,

Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM
NIP. 19580206 198503 1 001

Jakarta, 5 Januari 2018
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ir. Sukarman
NIP. 19630106 198903 1 001

SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

NO. I. PEJABAT PENILAI		NO. II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1 Nama	Dr. Ir. Suwandi, M.Si	1 Nama	Ir. Yasid Taufik, MM			
2 NIP	19670323 199203 1 003	2 NIP	19620531 198903 1 001			
3 Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Muda /IVc/1 Oktober 20	3 Pangkat/Gol.Ruang/TMT	Pembina Utama Madya / IVd / 1 Oktober 201			
4 Jabatan	Direktur Jenderal Hortikultura	4 Jabatan	Direktur			
5 Unit Kerja	Direktorat Jenderal Hortikultura	5 Unit Kerja	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil			
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Menetapkan rumusan rencana kerja dan anggaran tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018	-	1 dokumen	100	3 bln	-
2	Menetapkan rumusan laporan bulanan, tahunan dan LAKIP Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	-	13 dokumen	100	12 bln	-
3	Melaksanakan kegiatan Pasar Tani Komoditas Hortikultura	-	24 kegiatan	100	12 bln	-
4	Menetapkan rumusan rencana kerja strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2015-2019	-	1 dokumen	100	12 bln	-
5	Menetapkan rancangan bahan kebijakan/regulasi dibidang hortikultura	-	8 dokumen	100	12 bln	-
6	Menetapkan rumusan rancangan kegiatan pengembangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2018	-	4 dokumen	100	12 bln	-
7	Menyiapkan penyusunan LAKIP Tahun 2017 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	-	1 dokumen	100	12 bln	-
8	Menetapkan rencana kegiatan kerjasama luar negeri di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura	-	1 dokumen	100	12 bln	-
9	Menetapkan rumusan pedoman umum dan juklak pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura	-	1 dokumen	100	3 bln	-
10	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan staf lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	-	1 kali	100	12 bln	-
11	Melaksanakan bimbingan teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura	-	1 kegiatan	100	12 bln	442.720.000
12	Pengawalan LTT Cabai bawang di 7 Propinsi	-	7 kegiatan	100	12 bln	-
13	Pengawalan Daerah Perbatasan di 1 Provinsi	-	1 kegiatan	100	12 bln	-
14	Pengawalan UPSUS PAJALE di 1 Provinsi (2 Kabupaten)	-	1 kegiatan	100	12 bln	-
15	Melaksanakan Pembinaan dan Pascapanen	-	1 kegiatan	100	12 bln	402.771.000

16	Melaksanakan Pembinaan Pengolahan Hasil	-	1	kegiatan	100	12	bln	460.462.000
17	Melaksanakan Bimbingan Pemasaran dan Investasi	-	1	kegiatan	100	12	bln	682.678.000
18	Melaksanakan Pelayanan Kantor	-	1	kegiatan	100	12	bln	420.538.000

Pejabat Penilai,

Dr. Ir. Suwandi, M.Si
NIP. 19670323 199203 1 003

Jakarta, 2 Januari 2018

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ir. Yasid Taufik, MM
NIP. 19620531 198903 1 001

Lampiran 4. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2018 – 2019

**Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2018 – 2019**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	
			2018	2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura (%)	2,83	3,29
		2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura (%)	7,38	10,65
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3 Produksi Cabai (Ton)	2,245,440	2,295,481
		4 Produksi bawang merah (Ton)	1,608,766	1,639,724
SP3	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)(%)	90	90
SP4	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura(%)	5	5
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (nilai)	82,50	83,00
		8 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)	73,75	74,00



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON (021) 7806881 / 7806775, FAKSIMILI (021) 7805880 / 78831845
WEBSITE : <http://hortikultura.deptan.go.id>
E-MAIL : setditjen@hortikultura.go.id

NOTA DINAS

No: B-907/R.C.020/D.1/03/2018

Kepada Yth : Direktur Jenderal Hortikultura
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Tanggal : 19 Maret 2018
Perihal : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Bersama ini terlampir kami sampaikan draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut mengacu pada Indikator Kinerja dan target kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura serta dokumen penganggaran (RKA-KL) tahun 2018.

Untuk itu mohon arahan dan perkenan Bapak Dirjen untuk dapat menandatangani dokumen RKT tersebut (terlampir) apabila tidak ada hal yang perlu diperbaiki kembali.

Demikian, atas perhatian Bapak Dirjen, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,


Sri Wijayanti Yusuf

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan hortikultura, seperti yang diamanatkan dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 memfokuskan pada rencana kegiatan strategis Direktorat Jenderal Hortikultura pembangunan hortikultura yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Dengan disusunnya RKT 2018 diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Spudnik Sujono Kamino, MM
NIP. 19580206 198503 1 001

pt

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan hortikultura Indonesia tahun 2015-2019 difokuskan pada penyelesaian masalah strategis, diantaranya: 1) Pengendalian inflasi dan substitusi impor; 2) Pembangunan hortikultura ramah lingkungan yang mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam untuk meningkatkan daya saing; 3) Mengantisipasi perubahan gaya hidup ; 4) Penguasaan pangsa pasar domestik dan ekspor dengan meningkatkan akselerasi pengutuhan kawasan-kawasan hortikultura dan memperkuat jejaring antar pelaku usaha hortikultura; 5) Pemanfaatan hasil kreatifitas, inovatif dan kearifan lokal dalam mengoptimalkan sistem budidaya hortikultura ramah lingkungan, dan penerapan teknologi pascapanen; 6) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura nusantara berbasis kawasan dengan fokus komoditas dan kegiatan dan dilakukan secara berkelanjutan; 7) meningkatkan citra apresiasi dan cinta akan hortikultura Indonesia serta perubahan pola pikir masyarakat Indonesia untuk mencintai hortikultura nusantara.

Pengembangan sub sektor hortikultura pada tahun 2018 masih diarahkan terutama pada pengembangan komoditas strategis hortikultura yaitu aneka cabai (cabai besar dan rawit), bawang merah. Komoditas cabai dan bawang merah telah secara nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional. Komoditas tersebut menjadi komoditas strategis yang mendapat perhatian bagi pemerintah dalam usahanya melakukan stabilisasi harga melalui stabilisasi produksi dan perbaikan mutu produk.

pengembangan sub sektor hortikultura juga diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan nasional dan komoditas spesifik lokasi agar meningkatkan skala usaha pengembangan hortikultura seperti jeruk, mangga, manggis, nenas, salak dan buah lainnya serta tanaman florikultura. Selain itu, jumlah buah impor yang berdatangan ke pasar lokal seperti jeruk membuat menurunnya pendapatan petani lokal hingga dapat mematikan pasar jeruk lokal. Pembangunan hortikultura bertujuan untuk mendorong tumbuh kembangnya agribisnis hortikultura yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, ramah bagi lingkungan, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, memperkuat perekonomian wilayah untuk mendukung pertumbuhan pendapatan nasional. Pengembangan komoditas buah diprioritaskan untuk dialokasikan pada daerah perbatasan karena wilayah perbatasan

memiliki peran strategis dari sisi geopolitik nasional. Nilai ekonomi di wilayah perbatasan memiliki potensi untuk medukung pembangunan ekonomi nasional meskipun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Kompleksitas kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan dituntut menjadi lebih professional searah dengan visi dan misi kementerian/lembaga. Kebijakan penganggaran diarahkan pada penganggaran dengan pendekatan program. Konsekuensi dari penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan penganggaran dengan pendekatan program tersebut dilakukan penyempurnaan secara bertahap, diantaranya melalui kebijakan penggunaan belanja bantuan pemerintah dan kejelasan bahasa penganggaran. Penerapan sistem penganggaran terpadu diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang terkait langsung dengan Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 adalah memberi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga capaian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian tahun 2018 adalah tersusunnya RKT Ditjen Hortikultura sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
- 2) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Renstra Kementerian Pertanian Revisi 2015-2019.
- 6) Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi 2015-2019.
- 7) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pertanian adalah :

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah :

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
- 2) Meningkatkan Nilai tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

2.2. Tujuan dan Target

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Hortikultura, maka tujuan strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga
- 2) Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi :

- 1) Stabilnya Produksi Cabe dan Bawang Merah
- 2) Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Target Sasaran Strategis Stabilnya Produksi Cabe dan Bawang Merah Tahun 2018 adalah:

No	Indikator	Target
1.	Produksi cabai besar	1.283.111 ton
2.	Produksi cabai rawit	962.329 ton
3.	Produksi bawang merah	1.436.407 ton
4.	Koefisien variasi produksi cabe besar	≤10 %
5.	Koefisien variasi produksi cabe rawit	≤15 %
6.	Koefisien variasi produksi bawang merah	≤16 %

Target Sasaran Strategis Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun 2017 adalah:

No	Indikator	Target
1.	Produksi jeruk	2.098.767 ton
2.	Produksi mangga	2.615.531 ton
3.	Produksi nenas	1.925.184 ton
4.	Produksi manggis	122.929 ton
5.	Produksi salak	1.164.386 ton
6.	Produksi kentang	1.471.828 ton
7.	Produksi buah lainnya	12.991.747 ton
8.	Jumlah produksi sayuran lainnya	8.013.641 ton
9.	Jumlah produksi tanaman obat	657.096 ton
10.	Jumlah produksi Daun dan Bunga Potong	827.579.765 tangkai
11.	Jumlah Produksi Tanaman Pot dan Lanskap	50.834.098 Pohon
12.	Jumlah Produksi Bunga Tabur	41.515.640 Kg

2.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi pembangunan hortikultura 2015-2019 fokus pada usaha pengembangan kawasan, pengolahan dan pemasaran hortikultura, pengembangan sistem perbenihan dan pengembangan sistem perlindungan, serta tata kelola manajemen. Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura
 - a) Peningkatan produksi hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta registrasi kebun/lahan usaha.
 - b) Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju kemandirian usaha hortikultura
 - c) Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan pola produksi
2. Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
 - a) Penerapan standar mutu dan penerapan sistem jaminan mutu
 - b) Penggunaan teknologi dan input yang lebih efisien
3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
 - a) Penguatan kelembagaan perbenihan (BPSB, BBI/BBH, Laboratorium kultur jaringan, penangkar benih)
 - b) Penumbuhan industri perbenihan dalam rangka penggandaan dan penyediaan/distribusi benih bermutu
 - c) Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk kemandirian benih dalam negeri

- d) Penyediaan benih sumber untuk menghasilkan benih bermutu
4. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
- a) Pengelolaan OPT melalui pendekatan konsep PHT
 - b) Fasilitasi pelaksanaan perlindungan Tanaman Hortikultura
 - c) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BPTPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT dan PPAH)
 - d) Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
 - e) Fasilitasi regulasi perlindungan dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing produk hortikultura
5. Tata Kelola Manajemen
- a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja
 - b) Peningkatan pengendalian internal
 - c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi
 - d) Peningkatan pengelolaan aset
 - e) Peningkatan aspek kehumasan
 - f) Pengelolaan regulasi hortikultura
 - g) Pengelolaan Sumberdaya hortikultura

III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program Pembangunan Hortikultura

Permentan No 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

Dengan demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai program yaitu:

“Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”

3.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan cerminan dari tugas unit eselon II yang ada di Direktorat Jenderal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan cerminan dari tugas unit eselon II yang ada di Direktorat Jenderal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan output kegiatan meliputi: kawasan jeruk, kawasan buah lainnya, kawasan florikultura, fasilitasi teknis dukungan produksi Buah dan Florikultura, Kawasan Buah di wilayah perbatasan, kawasan mangga, kawasan manggis, kawasan pisang.
2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan output kegiatan meliputi: kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan, fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat.
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: sarana prasarana pascapanen, bangsal pascapanen, sarana prasarana pengolahan, pembinaan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: produksi benih bawang merah, benih buah lainnya, benih jeruk, benih sayuran lainnya, benih cabai, sarana prasarana benih hortikultura, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura.
5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan dengan output kegiatan meliputi: gerakan pengendalian OPT Cabai dan Bawang merah, Desa Pertanian Organik, Fasilitas teknis dukungan perlindungan hortikultura.

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: 1) layanan dukungan manajemen eselon I yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, hukum, kehumasan dan kepegawaian; laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura; 2) Layanan Internal terdiri dari perangkat pengolah data dan komunikasi; penataan; dan 3) layanan perkantoran, terdiri dari administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan, pembayaran gaji dan tunjangan serta pemeliharaan kantor .

3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk mempertajam pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Langkah Operasional Pengembangan Kawasan
 - Peningkatan produksi hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi
 - Pengembangan lahan baru untuk pengembangan kawasan cabe bawang merah dan sayuran lain (bawang putih)
 - Pengembangan kawasan buah diutamakan untuk di daerah perbatasan
 - Perbaikan produksi pola tanam cabe dan bawang merah
2. Langkah Operasional Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura
 - Fasilitasi sistem distribusi penyimpanan dan rantai dingin
 - Penyediaan dan pembinaan bangsal pascapanen
 - Penyediaan sarana prasarana pascapanen
 - Fasilitasi penerapan jaminan mutu
 - Fasilitasi sarana prasarana pengolahan
 - Fasilitasi pemasaran hortikultura
3. Langkah Operasional Pengembangan Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura
 - Penyediaan benih sumber dalam bentuk biji *True Shallot Seed* (TSS) dan umbi khusus untuk bawang merah
 - Perbaikan infrstruktur perbenihan pada penangkatan
 - Sertifikasi benih bermutu
4. Langkah Operasional Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman
 - Gerakan pengendalian OPT secara ramah lingkungan
 - Fasilitasi model penerapan pengendalian OPT yang ramah lingkungan
 - Pengamatan lapang terhadap serangan OPT dan DPI

5. Langkah Operasional Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Usaha Hortikultura

- Penguatan peran kapasitas lembaga pengelola
- Penguatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola
- Penerapan manajemen pembangunan berbasis *Clean and Good Governance*
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 penjabaran rencana kinerja dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi Tahun 2015-2019. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Disamping itu, kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan program kegiatan hortikultura melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I: Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Program		Indikator Kinerja Strategis		Satuan	Target
SP01	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	2,83
		2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	%	7,38
SP02	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3	Produksi cabai	Ton	2,245,440
		4	Produksi bawang merah	Ton	1,608,766
SP03	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	%	100
SP04	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	5
SP05	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	82,50
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	73,75



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

**JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON (021) 7806881 / 7806775, FAKSIMILI (021) 7805880 / 78831845
WEBSITE : <http://hortikultura.deptan.go.id>
E-MAIL : setditjen@hortikultura.go.id**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Spudnik Sujono Kmino
Jabatan : Dlrektur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 04 Januari 2018

Pihak Pertama

Spudnik Sujono Kmino

Pihak Kedua

A. Amran Sulaiman



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JL. AUP NO. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON (021) 7806775 / 78832048 / 78831845 FAXIMILE (021) 78844037 / 7805880
Homepage : <http://hortikultura.pertanian.go.id/>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suwandi
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

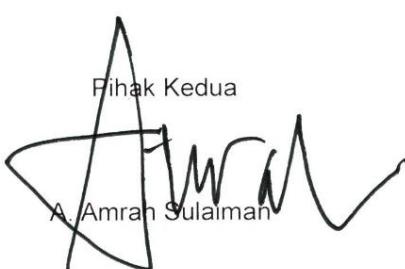
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2018

Pihak Pertama


Suwandi

Pihak Kedua


A. Amran Sulaiman



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON (021) 7806881 / 7806775, FAKSIMILI (021) 7805880 / 78831845
WEBSITE : <http://hortikultura.deptan.go.id>
E-MAIL : setditjen@hortikultura.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suwandi
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

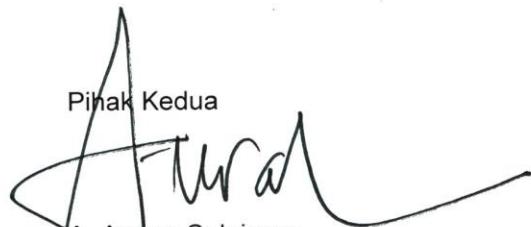
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Desember 2018

Pihak Pertama


Suwandi

Pihak Kedua


A. Amran Sulaiman

Lampiran 9. Realisasi Anggaran dan Fisik Per Triwulan Tahun 2018

REALISASI FISIK DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TA 2018

REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TA 2018

No.	Nama Output	Pagu	Realisasi Pagu							
			Trw 1		Trw 2		Trw 3		Trw 4	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	1771.024 Kawasan Bawang Merah	219.725.273.000	2.631.455.652	1,20	52.005.146.007	23,67	149.230.517.251	67,92	205.816.322.253	93,67
2.	1771.025 Kawasan Sayuran Lainnya	258.784.687.000	1.031.085.892	0,40	4.914.082.608	1,90	21.342.931.788	8,25	216.187.551.397	83,54
3.	1771.051 Kawasan Aneka Cabai	388.219.592.000	13.193.293.100	3,40	139.479.656.925	35,93	292.223.595.900	75,27	371.440.995.300	95,68
4.	1771.073 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman	9.850.307.000	1.794.751.200	18,22	3.325.990.310	33,77	5.386.563.004	54,68	9.637.724.488	97,84
5.	1771.080 Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	544.310.000	71.837.900	13,20	124.130.700	22,81	339.087.607	62,30	512.750.482	94,20
6.	1772.022 Benih Buah Lainnya	30.188.571.000	752.829.379	2,49	5.148.046.921	17,05	7.666.312.624	25,39	24.433.756.352	80,94
7.	1772.024 Benih Bawang Merah	16.124.968.000	218.943.571	1,36	2.724.016.721	16,89	9.304.229.818	57,70	13.365.757.096	82,89
8.	1772.027 Benih Jeruk	9.544.424.000	106.255.000	1,11	1.761.496.050	18,46	2.054.138.450	21,52	7.948.079.102	83,27
9.	1772.060 Sertifikasi Benih Hortikultura	16.800.000.000	1.223.246.825	7,28	5.683.775.538	33,83	10.116.204.168	60,22	16.277.791.166	96,89
10.	1772.072 Benih Sayuran Lainnya	7.840.000.000	26.600.000	0,34	446.900.000	5,70	2.678.187.960	34,16	4.595.575.110	58,62
11.	1772.073 Fasilitas teknis Dukungan perbenihan hortikultura	9.296.306.000	1.123.491.787	12,09	2.682.558.621	28,86	5.216.186.035	56,11	9.001.056.649	96,82
12.	1772.074 Sarana Prasarana Benih Hortikultura	13.383.840.000	3.373.000	0,03	582.061.150	4,35	3.415.052.123	25,52	10.625.102.058	79,39
13.	1772.075 Benih Cabai	3.008.000.000	217.822.500	7,24	966.330.790	32,13	1.989.020.590	66,12	2.902.396.443	96,49
14.	1773.061 Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	35.664.158.000	2.530.223.200	7,09	10.449.524.909	29,30	19.799.301.593	55,52	34.652.303.654	97,16
15.	1773.063 Desa Pertanian Organik	12.500.000.000	131.061.500	1,05	806.090.950	6,45	4.013.205.590	32,11	12.127.730.709	97,02
16.	1773.064 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura	1.080.527.000	210.949.850	19,52	381.872.650	35,34	679.230.150	62,86	1.072.488.100	99,26
17.	1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	45.690.776.000	6.524.436.734	14,28	14.308.475.732	31,32	24.577.035.393	53,79	42.964.325.615	94,03
18.	1774.951 Layanan Internal (Overhead)	4.343.160.000	49.000.000	1,13	817.062.400	18,81	1.126.965.350	25,95	2.400.986.600	55,28
19.	1774.994 Layanan Perkantoran	76.549.669.000	10.175.060.796	13,29	31.198.159.016	40,76	49.893.056.707	65,18	72.856.416.656	95,18
20.	5886.024 Kawasan Buah Lainnya	4.413.770.000	13.500.000	0,31	676.593.000	15,33	1.412.610.991	32,00	3.104.082.491	70,33
21.	5886.027 Kawasan Jeruk	16.346.893.000	670.422.000	4,10	5.250.427.800	32,12	13.438.064.750	82,21	15.978.000.750	97,74
22.	5886.054 Kawasan Florikultura	2.200.000.000	104.000.000	4,73	674.620.000	30,66	1.529.372.400	69,52	2.173.180.400	98,78
23.	5886.061 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura	2.352.436.000	700.664.850	29,78	1.682.693.810	71,53	2.126.814.810	90,41	2.336.060.910	99,30
24.	5886.065 Kawasan buah di wilayah perbatasan	31.120.000	11.170.000	35,89	25.430.000	81,72	25.430.000	81,72	25.430.000	81,72
25.	5886.066 Kawasan Mangga	14.250.200.000	133.080.000	0,93	1.834.975.871	12,88	3.309.609.971	23,23	9.707.700.196	68,12
26.	5886.067 Kawasan Manggis	10.972.638.000	229.601.000	2,09	1.548.342.628	14,11	1.518.797.628	13,84	7.539.307.278	68,71
27.	5886.068 Kawasan Pisang	9.220.675.000	16.200.000	0,18	1.398.028.625	15,16	1.951.784.125	21,17	4.443.973.588	48,20
28.	5887.053 Sarana Prasarana Pengolahan	89.950.000	0	0,00	89.950.000	100,00	89.950.000	100,00	89.950.000	100,00
29.	5887.055 Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura	5.495.500.000	246.634.653	4,49	754.453.138	13,73	1.725.519.208	31,40	4.365.747.218	79,44
30.	5887.062 Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	15.110.875.000	102.413.090	0,68	2.697.843.493	17,85	8.179.343.038	54,13	14.572.983.627	96,44
31.	5887.063 Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	2.409.169.000	697.075.481	28,93	1.651.477.546	68,55	2.039.027.422	84,64	2.374.440.532	98,56
32.	5887.064 Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	598.000.000	0	0,00	71.785.000	12,00	254.120.000	42,49	566.487.750	94,73
	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	1.242.629.794.000							1.126.096.453.970	90,62

Lampiran 10. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura

MATRIKS RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	
	Upaya yang telah dilakukan :	
	1. Melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura	1. Meningkatkan upaya perluasan pasar untuk komoditas hortikultura potensial ekspor
	2. Pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP terutama untuk komoditas potensi ekspor	2. Membuat prioritas alokasi pengembangan kawasan untuk tujuan ekspor dengan pendampingan intensif dan prioritas berikutnya kawasan reguler untuk memenuhi pasar domestik
	3. Mendorong percepatan registrasi kebun dalam memenuhi persyaratan ekspor	3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas setempat untuk mempercepat registrasi kebun
	4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengajuan registrasi rumah kemasan.	4. Meningkatkan upaya pembinaan dan pendampingan pengajuan pendaftaran rumah kemasan
	5. Mendorong kemitraan usaha antara kelembagaan tani dengan perusahaan eksportir dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu ekspor	5. Membangun kelembagaan hortikultura yang mandiri dalam bentuk korporasi untuk dapat bermitra dengan perusahaan
2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	
	Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan impor komoditas substitusi impor adalah :	
	1. Pengembangan kawasan jeruk dengan melakukan pembinaan, pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi sarana produksi.	1. Peningkatan kawasan pengembangan kawasan, prioritas pengembangan kawasan jeruk dengan menggunakan varietas unggulan yang potensial di lokasi/kawasan yang tepat, yang didukung oleh SDA dan SDM yang sesuai
	2. Pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional dan mencapai swasembada pada Tahun 2021, dengan melakukan pembinaan, pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi sarana produksi.	2. Terus melakukan upaya pembinaan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan petani dan meningkatkan produktivitas bawang putih.
	3. Untuk mendukung pengembangan kawasan telah dilakukan upaya meningkatkan ketersediaan benih dalam negeri seperti mendorong pengembangan benih bermutu varietas unggul, merevisi peraturan perbenihan untuk mendukung swasembada bawang putih, melakukan penjajakan ketersediaan benih bawang putih di beberapa negara dan melakukan kerjasama dengan BUMN dalam penyediaan benih bawang putih.	3. Meningkatkan ketersediaan benih bermutu untuk komoditas jeruk dan bawang putih.

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
3	Produksi cabai Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2018 melalui pengaturan pola tanam, menekan biaya produksi dengan pengendalian OPT ramah lingkungan, penerapan irigasi hemat air, penggunaan mulsa, dan pemberdayaan champion.	Untuk dapat mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai adalah menyusun pola tanam 2019 baik berdasarkan SPH dan kebutuhan riil, menghitung kebutuhan dan luas panen riil cabai per kabupaten per provinsi tahunan, konsistensi daerah untuk melaksanakan manajemen pola tanam, mendorong percepatan proses pengadaan APBN, sosialisasi log book dan sistem budidaya ramah lingkungan serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan champion.
4	Produksi Bawang Merah Akar permasalahan belum tercapainya produksi bawang merah Tahun 2018 disebabkan antara lain : 1. Harga bawang merah yang sempat jatuh dan stabil rendah sehingga menurunkan minat petani untuk menanam bawang merah.	1. Menjaga pola tanam sehingga panen lebih terukur. Hal ini untuk menghindari adanya over produksi yang menyebabkan harga jatuh di tingkat petani. Salah satunya dengan memperkuat peran champion untuk menjaga manajemen tanam di lapangan. Serta menerapkan <i>ceiling</i> dan <i>floor price</i> untuk menjaga harga di tingkat petani sampai konsumen.
	2. Kondisi kering/musim kemarau yang cukup panjang berpengaruh signifikan terhadap produksi dan produktivitas terutama di wilayah sentra.	2. Menyediakan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan (jika harga rendah), gudang berpendingin untuk memperpanjang umur simpan bawang merah sebagai <i>buffer stock</i> pemerintah, alat dan mesin pengolahan bawang merah.
	3. Di beberapa wilayah, terjadi peralihan tanam dari bawang merah menjadi komoditas lainnya.	3. Melakukan upaya meyakinkan petani agar tetap memiliki minat tanam bawang merah seperti menjaga stabilitas harga dan memfasilitasi sarana pascapanen
5	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura)	
	Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal pascapanen atau gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun komoditas yang masif. Langkah operasional yang telah dilakukan antara lain fasilitasi peralatan pascapanen, pengadaan bangsal pascapanen, dan bimbingan teknis pascapanen.	Untuk tahun mendatang akan dilaksanakan fasilitasi pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, fasilitasi pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya, bimbingan teknis pascapanen hortikultura dan bimbingan teknis pengolahan hortikultura.

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
6	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan analisa data OPT dan DPI belum memadai; 2. Serangan OPT yang belum tertangani secara optimal, 3. Jumlah PHP-POPT perlindungan tanaman sangat terbatas, 4. Sarana dan prasarana LPHP/LAH dan fasilitas klinik PHT tidak memadai, 5. Keterbatasan kegiatan penyiapan draft pest list. 	Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, tahun 2019 Direktorat Perlindungan Hortikultura melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura akan melakukan kegiatan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT dan DPI, 2. Meningkatkan koordinasi dan kapabilitas petugas perlindungan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan OPT hortikultura; 3. Memberdayakan petugas lapang (PHP-POPT) yang tersedia dalam melakukan pengamatan dan pelaporan keadaan serangan OPT dan DPI; 4. Melakukan penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai; 5. Meningkatkan kegiatan penyiapan draft pest list yang memadai.
7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Penilaian akan dilakukan pada akhir bulan Februari - Maret 2019	Penilaian di tahun depan akan dijadwalkan diawal tahun
8	Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011) <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertibnya petugas pelaporan Satker dalam melaporkan capaian keluaran bulanan (realisasi volume keluaran) dan capaian output kegiatan per semester. Masih banyak Satker yang belum menginput laporan realisasi volume output dan realisasi indikator output kegiatan. 2. Masih banyak daerah yang tidak konsisten antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana. 3. Beberapa Satker daerah memiliki realisasi serapan anggaran yang rendah karena permasalahan teknis dan administrasi. 4. Terdapat beberapa indikator sasaran program yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan absensi pelaporan SPH yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala 2. Melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker – satker mandiri 3. Perlu dilakukan identifikasi potensi masalah yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan satker dalam pelaksanaan kegiatan 4. Petugas data melakukan validasi ke daerah yang absensi pelaporan datanya rendah